

LAPORAN KINERJA



TRIWULAN I
TAHUN 2024



BPIU2K

Balai Produksi Induk Udang Unggul
dan Kekeangan Karangasem

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024 telah terlaksana dengan baik. Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024 ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja BPIU2K Karangasem dalam kurun waktu Januari–Maret 2024.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi yang efektif dan efisien, serta sarana evaluasi atas kinerja yang telah dicapai pada Triwulan I Tahun 2024 sehingga dapat ditetapkan langkah-langkah strategis yang antisipatif dan solutif untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Penyusunan laporan ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perhatian dan perbaikan penyusunan laporan berikutnya.

Semoga laporan ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Karangasem, 22 April 2024

Kepala Balai



Wendy Tri Prabowo

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
<i>Ringkasan Eksekutif</i>	viii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Tugas dan Fungsi.....	2
1.4. SUMBER DAYA MANUSIA	3
1.5. JUMLAH PEGAWAI.....	4
1.6. Permasalahan dan Tantangan	4
1.7. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	5
BAB II	7
PERENCANAAN KINERJA	7
2.1. Rencana Strategis Tahun 2020- 2024	7
2.2. Perjanjian dan Pelaporan Kinerja.....	8
2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024.....	15
BAB III	16
AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	16
3.2. Analisis Capaian Kinerja	19
3.2.1. Sasaran Kegiatan (SK-1): Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya meningkat di BPIU2K Karangasem	19
3.2.2. Sasaran Kegiatan (SK-2): Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	24
3.2.3. Sasaran Kegiatan (SK-3): Meningkatkan kualitas pengendalian kesehatan ikan.....	31
3.2.4. Sasaran Kegiatan (SK-4): Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di BPIU2K Karangasem	37
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	57
3.4 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA.....	58
BAB IV	61
PENUTUP	61
4.1 KESIMPULAN	61
4.2 SARAN.....	61

DAFTAR GAMBAR

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Gambar 2. 1 Perjanjian Kinerja BPIU2K Karangasem Tahun 2024.....	14
--	----

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Gambar 3. 1 NPSS BPIU2K Karangasem Triwulan I pada Aplikasi Kinerja.....	17
Gambar 3. 2 Rincian Nilai Kinerja Organisasi.....	17
Gambar 3. 3 Capaian Nilai PNBK BPIU2K Karangasem.....	20
Gambar 3. 4 Publikasi layanan dan PNBK.....	21
Gambar 3. 5 Kegiatan Penerimaan PNBK BPIU2K Karangasem.....	22
Gambar 3. 6 Nilai PNBK BPIU2K Karangasem.....	24
Gambar 3. 7 Produksi calon induk unggul.....	25
Gambar 3. 8 Produksi Calon Induk Unggul.....	25
Gambar 3. 9 Capaian bantuan benih yang disalurkan.....	28
Gambar 3. 10 Capaian bantuan calon induk unggul yang tersalurkan.....	29
Gambar 3. 11 Persentase diseminasi teknologi.....	31
Gambar 3. 12 Layanan pengujian kesehatan ikan dan kualitas lingkungan.....	32
Gambar 3. 13 Produksi Calon Induk Unggul.....	33
Gambar 3. 14 Kegiatan dalam rangka pelayanan laboratorium uji.....	34
Gambar 3. 15 Ruang Lingkup Laboratorium yang Terakreditasi.....	34
Gambar 3. 16 Produksi Calon Induk Unggul.....	36
Gambar 3. 17 Persentase Pengujian AMR.....	36
Gambar 3. 14 Pengambilan dan Pengujian AMR.....	37
Gambar 3. 19 Indeks profesionalitas ASN.....	40
Gambar 3. 20 Sosialisasi Kode Etik Pegawai.....	41
Gambar 3. 17 Indeks pengelolaan kepegawaian.....	41
Gambar 3. 22 Hasil Penilaian Pembangunan ZI menuju WBK.....	42
Gambar 3. 23 Persentase Penyelesaian LHP BPK.....	44
Gambar 3. 24 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP.....	45
Gambar 3. 25 Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan.....	47
Gambar 3. 26 Capaian Indikator Kinerja sesuai Surat Dinas DJPB.....	47
Gambar 3. 27 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).....	49
Gambar 3. 28 Nilai Kinerja Anggaran.....	50
Gambar 3. 29 Tingkat kepatuhan pengadaan barang dan jasa.....	51
Gambar 3. 30 Tingkat kepatuhan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).....	52
Gambar 3. 31 Pelaku Usaha Budi Daya Ikan Yang Terintegrasi KUSUKA.....	53
Gambar 3. 32 Rasio jumlah pemberitaan netral dan positif.....	54
Gambar 3. 33 Capaian Indikator Kinerja sesuai data dukung.....	55
Gambar 3. 34 Nilai pengawasan kearsipan.....	55
Gambar 3. 35 Layanan perkantoran.....	56
Gambar 3. 36 Capaian Indikator Kinerja sesuai data dukung.....	57
Gambar 3. 37 Pagu dan Realisasi Belanja s.d triwulan I 2024.....	57

DAFTAR TABEL

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel 3. 1 Capaian IKU sampai dengan Triwulan I.....	18
Tabel 3. 2 Rincian penerimaan PNBP s.d Triwulan I.....	21
Tabel 3. 3 Perbandingan realisasi Triwulan I Tahun 2023 dan 2024	23
Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi anggaran berdasarkan jenis kegiatan.....	58
Tabel 3. 5 Efisiensi anggaran Triwulan I tahun 2024	59

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan (BPIU2K) Karangasem Triwulan I Tahun 2024 merupakan laporan capaian kinerja atas target yang telah dicapai dalam kurun waktu 3 bulan, serta sebagai wujud dari pertanggungjawaban BPIU2K Karangasem dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2024. Mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BPIU2K Karangasem tahun 2020 – 2024, maupun Penetapan Kinerja (PK) BPIU2K Karangasem Tahun 2024, maka LKj Triwulan I Tahun 2024 ini memuat rencana kinerja beserta target yang ingin dicapai serta pengukuran pencapaian indikator kinerja termasuk keberhasilan dan kendala pelaksanaan kegiatan lingkup BPIU2K Karangasem sampai dengan Maret Tahun 2024.

A. KINERJA ORGANISASI

1. Perhitungan Kinerja Organisasi BPIU2K Karangasem Tahun 2024 dilakukan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada Januari 2024 yang terdiri dari 4 (Empat) Sasaran Kegiatan dan 22 (Dua Puluh Dua) Indikator Kinerja.
2. Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPIU2K Karangasem Triwulan I Tahun 2024 sebesar 117,05 yang terdiri dari

No	Sasaran Kegiatan	Nilai Kinerja
SK1	Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya meningkat di BPIU2K Karangasem	120,00
SK2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	109,80
SK3	Meningkatnya kualitas pengendalian kesehatan ikan	120,00
SK4	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BPIU2K Karangasem	118,41

Sumber: Aplikasi Kinerjaku, 22 April 2024

3. Capaian Indikator Kinerja BPIU2K Karangasem Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

NO	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Target TW I	Capaian s.d TW I	% Capaian TW I	% Capaian Tahunan
SK1 Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya meningkat di BPIU2K Karangasem						
1	Nilai PNBP yang Diperoleh BPIU2K Karangasem (Rupiah)	723.400.000	137.585.000	184.168.067	133,86	25,46
SK2 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan						
2	Calon Induk Unggul Yang Diproduksi (Ekor)	114.413	28.306	31.080	109,80	27,16
3	Persentase Bantuan Benih yang Disalurkan (Persen)	75				
4	Persentase Bantuan Calon Induk Yang Disalurkan (Persen)	75				
5	Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran Ikan (Persen)	100				
SK3 Meningkatnya kualitas pengendalian kesehatan ikan						
6	Persentase layanan pengujian kesehatan ikan dan kualitas lingkungan (%)	100	20	46,23	231,15	46,23
7	Ruang lingkup laboratorium yang terakreditasi (parameter)	4				
8	Persentase bakteri patogen pada ikan yang resisten terhadap anti mikroba (AMU/AMR) (%)	100	10	37,14	371,40	37,14
SK4 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BPIU2K Karangasem						
9	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) BPIU2K Karangasem (%)	85				
10	Indeks Pengelolaan Kepegawaian (indeks)	4				
11	Unit Kerja yang Berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (Nilai)	76				
12	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BPIU2K Karangasem (Persen)	100				
13	Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PM SAKIP) BPIU2K Karangasem (Nilai)	82				
14	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPIU2K Karangasem (%)	80	80	100	125,00	125,00
15	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPIU2K Karangasem (Nilai)	93,76				
16	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup BPIU2K Karangasem (Nilai)	86				
17	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPIU2K Karangasem (Nilai)	80				
18	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BPIU2K Karangasem (Nilai)	80				
19	Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (Persen)	91				

NO	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Target TW I	Capaian s.d TW I	% Capaian TW I	% Capaian Tahunan
20	Persentase Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Wilayah Kerja BPIU2K Karangasem (Persen)	>86	>86	100	116,28	116,28
21	Nilai Pengawasan Kearsipan BPIU2K Karangasem (Nilai)	75				
22	Persentase Layanan Perkantoran BPIU2K Karangasem (Persen)	80	80	100	125,00	125,00

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan perikanan budidaya tahun 2020-2024 perlu memiliki perencanaan yang berkualitas, efektif, dan efisien. Sesuai dengan amanat PP No. 17 Tahun 2017, perencanaan dan penganggaran nasional harus dilakukan melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial berdasarkan prinsip *money follows program*. Berdasarkan pada isu dan permasalahan yang masih dihadapi, Ditjen Perikanan Budidaya perlu me-reformulasi kebijakan pembangunan 5 tahun ke depan dengan memfokuskan pada pengelolaan sumber daya perikanan budidaya yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial, bukan lagi semata pada peningkatan produksi saja.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB), Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekekangan (BPIU2K) Karangasem ikut mendukung pelaksanaan program yang menjadi prioritas DJPB tahun 2024. BPIU2K Karangasem dengan ruang lingkup terbatas tetapi mempunyai peran dalam penyediaan induk unggul dan benih bermutu udang dan kekekangan yang terkait langsung dengan Indikator Kinerja Utama DJPB yaitu meningkatkan produksi perikanan budidaya.

Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dibuat sebelumnya. Laporan Kinerja (LKj) juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*clean governance and good governance*) dapat diwujudkan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) BPIU2K Karangasem Triwulan I Tahun 2024 disusun dengan tujuan:

- a) Bahan informasi terkait rencana dan capaian kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi BPIU2K Karangasem
- b) Alat pertanggungjawaban atas pelaksanaan program atau kegiatan dan pengelolaan anggaran BPIU2K Karangasem
- c) Bahan evaluasi atas kinerja yang telah dicapai pada periode Triwulan I, dan alat untuk menentukan langkah-langkah strategis yang antisipatif dan solutif untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tanggal 30 Desember 2020, sebagai Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, tugas pokok BPIU2K Karangasem adalah melaksanakan produksi induk udang unggul dan kekerangan serta benih bermutu. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPIU2K Karangasem menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang produksi induk udang unggul dan kekerangan;
- b) Pelaksanaan uji mutu dan uji lingkungan dan penyakit pada induk udang unggul dan kekerangan serta benih bermutu;
- c) Pengelolaan produksi induk udang unggul dan kekerangan serta benih bermutu;
- d) Pelaksanaan pemuliaan untuk menghasilkan induk penjenis udang unggul dan kekerangan;
- e) Pelayanan teknis di bidang produksi induk udang unggul dan kekerangan serta benih bermutu;
- f) Pengelolaan sarana dan prasarana di bidang produksi induk udang unggul dan kekerangan serta benih bermutu;
- g) Pengolahan dan analisis data serta pengelolaan sistem informasi dan publikasi; dan
- h) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

1.4. SUMBER DAYA MANUSIA

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya, susunan organisasi Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem terdiri atas:

1. Kepala

Kepala Balai sebagai pimpinan unit kerja mempunyai tugas untuk merumuskan kegiatan, mengkoordinasikan dan mengarahkan tugas penerapan teknik perbenihan dan penerapan teknik produksi induk udang unggul serta membina bawahan di lingkungan BPIU2K Karangasem, Bali sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Subbagian Umum

Subbagian umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi, dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

1.5. JUMLAH PEGAWAI

Jumlah pegawai BPIU2K Karangasem sampai dengan 31 Maret 2024 adalah 85 orang yang terdiri dari 27 PNS (Pegawai Negeri Sipil), 7 (tujuh) PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), 40 tenaga PPNP (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri), dan 35 (tiga puluh lima) Penyedia Jasa Lainnya Perorangan sesuai diagram pada Gambar 1.1. Pegawai tersebut tersebar di 2 (dua) lokasi yaitu instalasi udang di Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem sebanyak 71 orang, instalasi kekerangan di Desa Sukadana, Kecamatan Kubu sebanyak 13 orang, dan instalasi Keramba Jaring Apung (KJA) sebanyak 3 orang.

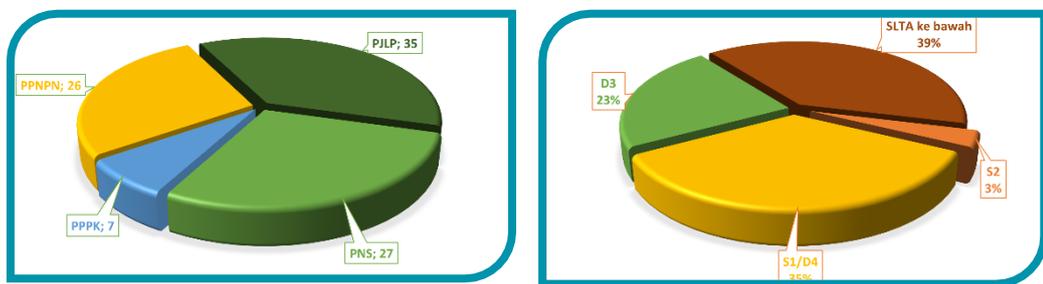


Diagram perbandingan pegawai berdasarkan status kepegawaian dan tingkat Pendidikan. Pegawai masih didominasi oleh PPNP, dan tingkat Pendidikan paling tinggi adalah SLTA ke bawah.

Gambar 1. 1 Detail status kepegawaian dan tingkat pendidikan

Apabila dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) BPIU2K Karangasem sampai dengan 31 Maret 2024 adalah sebagai berikut: (i) S2 sejumlah 3 orang; (ii) S1/D4 sejumlah 31 orang; (iii) D3/D2/D1 sejumlah 20 orang; dan (iv) SLTA ke bawah sejumlah 35 orang. Persentase SDM berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Gambar 1.1.

1.6. Permasalahan dan Tantangan

Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem memiliki peran strategis sebagai:

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Tahun 2024, terdapat beberapa isu strategis yang dihadapi oleh BPIU2K Karangasem yang terdiri atas:

- 1) Isu Internal
 - a. Peningkatan *biosecurity* pada seluruh kegiatan dan area produksi
 - b. Penilaian WBK Tahun 2024 oleh Tim Penilai Internal KKP
- 2) Isu Eksternal
 - a. Calon induk unggul dan benih bermutu udang vaname (Nusa Dewa) dan kekerangan teruji dan dimanfaatkan oleh masyarakat
 - b. Rasa ingin tahun pihak eksternal terhadap komoditas BPIU2K Karangasem mengalami peningkatan

1.7. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja (LKj) Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan (BPIU2K) Karangasem Triwulan I Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. **Ringkasan Eksekutif**, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja BPIU2K Karangasem sampai dengan Maret 2024.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini disajikan hal-hal terkait latar belakang, maksud dan tujuan penulisan LKj, uraian singkat terkait BPIU2K Karangasem dan permasalahan utama yang sedang dihadapi, serta sistematika penyajian LKj.
3. **Bab II Perencanaan**, pada bab ini disajikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran dan kebijakan dan program BPIU2K Karangasem pada tahun 2020-2024, rencana kerja dan anggaran, penetapan kinerja, serta pengukuran/pengelolaan kinerja BPIU2K Karangasem Triwulan I Tahun 2024.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, pada bab ini disajikan capaian atas target Indikator Kinerja Utama (IKU) BPIU2K Karangasem serta evaluasi dan analisis kinerja sampai dengan Triwulan I. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran.

5. **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan kesimpulan atas capaian kinerja BPIU2K Karangasem sampai dengan Triwulan I, serta saran perencanaan dan kebijakan untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2020- 2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020, telah mengamanatkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing.

Perikanan Budidaya dengan potensi dan keunggulan karakteristik yang ada, diyakini mampu memberi kontribusi pada 9 agenda pembangunan nasional pemerintah (NAWACITA), diantaranya mewujudkan kemandirian ekonomi (termasuk pembudidaya ikan), serta memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi budidaya yang memiliki daya saing dan berkelanjutan. Penjabaran pelaksanaan pembangunan perikanan budidaya, lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Strategi (RENSTRA) Perikanan Budidaya 2020-2024, yang merupakan kesinambungan dari Renstra 2015-2019, serta disesuaikan dengan perubahan kondisi eksternal dan internal perikanan budidaya guna menjawab tantangan global. Pembangunan perikanan budidaya adalah upaya yang sistematis dan terencana oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah suatu kondisi perikanan budidaya menjadi lebih baik, melalui pemanfaatan sumberdaya secara optimal, efektif, efisien dan akuntabel guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Keckerangan Karangasem sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mendukung pelaksanaan kinerja Ditjen Perikanan Budidaya melalui beberapa langkah strategis, yaitu; (i) Penetapan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama BPIU2K Karangasem tahun 2024; (ii) Perjanjian Kinerja BPIU2K Karangasem tahun 2024; dan (iii) Penyusunan rencana aksi dan rincian target tahun 2024.

2.2. Perjanjian dan Pelaporan Kinerja

Penetapan Perjanjian Kinerja adalah pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽³⁾ Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Tabel 2. 1 Keselarasan Target IKU Perjanjian Kinerja 2024 dengan Renstra

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET		KETERANGAN
		RENSTRA 2020-2024	PERJANJIAN KINERJA 2024	
1	Nilai PNBP yang Diperoleh BPIU2K Karangasem (Rupiah)	723.000.00	723.400.000	Adanya penambahan target dari eselon I
2	Calon Induk Unggul Yang Diproduksi (Ekor)	-	114.413	Adanya penyesuaian nomenklatur dan target volume mengacu Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dalam SK DJPB
3	Persentase Bantuan Benih yang Disalurkan (Persen)	-	75	Adanya penyesuaian nomenklatur dan target volume mengacu Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dalam SK DJPB
4	Persentase Bantuan Calon Induk Yang Disalurkan (Persen)	-	75	Adanya penyesuaian nomenklatur dan target volume mengacu Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dalam SK DJPB
5	Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran Ikan (Persen)	-	100	Adanya penyesuaian nomenklatur dan target volume mengacu Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dalam SK DJPB
6	Persentase layanan pengujian kesehatan ikan dan kualitas lingkungan (%)	2.700	100	Adanya penyesuaian nomenklatur dan target volume mengacu Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dalam SK DJPB

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET		KETERANGAN
		RENSTRA 2020-2024	PERJANJIAN KINERJA 2024	
7	Ruang lingkup laboratorium yang terakreditasi (parameter)	-	4	Adanya penyesuaian nomenklatur dan target volume mengacu Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dalam SK DJPB
8	Persentase bakteri patogen pada ikan yang resisten terhadap anti mikroba (AMU/AMR) (%)	-	100	Adanya penyesuaian nomenklatur dan target volume mengacu Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dalam SK DJPB
9	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) BPIU2K Karangasem (%)	76	85	Adanya penyesuaian nomenklatur dan target volume mengacu Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dalam SK DJPB
10	Indeks Pengelolaan Kepegawaian (indeks)	-	4	Adanya penyesuaian nomenklatur penambahan IK baru dan target volume mengacu Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dalam SK DJPB
11	Unit Kerja yang Berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (Nilai)	79	76	Adanya penyesuaian nomenklatur dan target volume mengacu Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dalam SK DJPB
12	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BPIU2K Karangasem (Persen)	100	100	Adanya penyesuaian nomenklatur dan target volume mengacu Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dalam SK DJPB
13	Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PM SAKIP) BPIU2K Karangasem (Nilai)	-	82	Adanya penyesuaian nomenklatur penambahan IK baru dan target volume mengacu Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dalam SK DJPB
14	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPIU2K Karangasem (%)	68	80	-
15	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPIU2K Karangasem (Nilai)	91	93,76	Adanya penyesuaian nomenklatur dan target volume mengacu Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dalam SK DJPB

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET		KETERANGAN
		RENSTRA 2020-2024	PERJANJIAN KINERJA 2024	
16	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup BPIU2K Karangasem (Nilai)	89	86	Adanya penyesuaian nomenklatur dan target volume mengacu Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dalam SK DJPB
17	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPIU2K Karangasem (Nilai)	-	80	Adanya penyesuaian nomenklatur penambahan IK baru dan target volume mengacu Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dalam SK DJPB
18	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BPIU2K Karangasem (Nilai)	-	80	Adanya penyesuaian nomenklatur penambahan IK baru dan target volume mengacu Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dalam SK DJPB
19	Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (Persen)	-	91	Adanya penyesuaian nomenklatur penambahan IK baru dan target volume mengacu Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dalam SK DJPB
20	Persentase Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Wilayah Kerja BPIU2K Karangasem (Persen)	-	>86	Adanya penyesuaian nomenklatur penambahan IK baru dan target volume mengacu Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dalam SK DJPB
21	Nilai Pengawasan Kearsipan BPIU2K Karangasem (Nilai)	-	75	Adanya penyesuaian nomenklatur penambahan IK baru dan target volume mengacu Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dalam SK DJPB
22	Persentase Layanan Perkantoran BPIU2K Karangasem (Persen)	-	80	Adanya penyesuaian nomenklatur penambahan IK baru dan target volume mengacu Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dalam SK DJPB

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAN www.kkp.go.id SUREL diti@npb@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN
KARANGASEM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Wendy Tri Prabowo**
Jabatan : Kepala Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

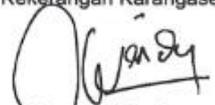
Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
Kepala Balai Produksi Induk Udang Unggul
Kekerangan Karangasem



Tb. Haeru Rahayu



Wendy Tri Prabowo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN
KARANGASEM**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya meningkat di BPIU2K Karangasem	1.	Nilai PNBP yang Diperoleh BPIU2K Karangasem (Rupiah)	723.400.000
2.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	2.	Calon Induk Unggul yang Diproduksi (Ekor)	114.413
		3.	Persentase Bantuan Benih yang Disalurkan (Persen)	75
		4.	Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan (Persen)	75
		5.	Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran Ikan (Persen)	100
3.	Meningkatnya kualitas pengendalian kesehatan ikan	6.	Persentase Layanan Pengujian Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan (Persen)	100
		7.	Ruang Lingkup Laboratorium yang Terakreditasi (Parameter)	4
		8.	Persentase Bakteri Patogen Pada Ikan yang Resisten Terhadap Anti Mikroba (AMU/AMR) (Persen)	100
4.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BPIU2K Karangasem	9.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) BPIU2K Karangasem (Persen)	85
		10.	Indeks Pengelolaan Kepegawaian (Indeks)	4
		11.	Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (Nilai)	76
		12.	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BPIU2K Karangasem (Persen)	100
		13.	Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PM SAKIP) BPIU2K Karangasem (Nilai)	82

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	14. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPIU2K Karangasem (Persen)	80
	15. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPIU2K Karangasem (Nilai)	93,76
	16. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup BPIU2K Karangasem (Nilai)	86
	17. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPIU2K Karangasem (Nilai)	80
	18. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BPIU2K Karangasem (Nilai)	80
	19. Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (Persen)	91
	20. Persentase Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Wilayah Kerja BPIU2K Karangasem (Persen)	>86
	21. Nilai Pengawasan Kearsipan BPIU2K Karangasem (Nilai)	75
	22. Persentase Layanan Perkantoran BPIU2K Karangasem (Persen)	80

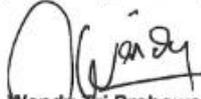
Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Kepala Balai Produksi Induk Udang
Unggul Kekerangan Karangasem



Wendy Tri Prabowo

DATA ANGGARAN :

No	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Perbenihan Ikan	6.648.951.000
2.	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	948.876.000
3.	Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	530.000.000
4.	Layanan Manajemen Dukungan Internal	10.319.703.000
Total Anggaran Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem		18.447.530.000

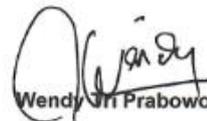
Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Kepala Balai Produksi Induk Udang Unggul Kekerangan Karangasem



Wendy JH Prabowo

Gambar 2. 1 Perjanjian Kinerja BPIU2K Karangasem Tahun 2024

2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam informasi indikator kinerja atau Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Data yang dimaksudkan sebagai capaian kinerja harus diverifikasi oleh tim kinerja sebagai data yang valid dari sumber data yang tepat. Pengukuran kinerja yang baik adalah dapat memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Triwulanan yang didukung dengan implemementasi Aplikasi BSC "Kinerjaku" yang merupakan Sistem Aplikasi Pengukuran Kinerja berbasis informasi teknologi.

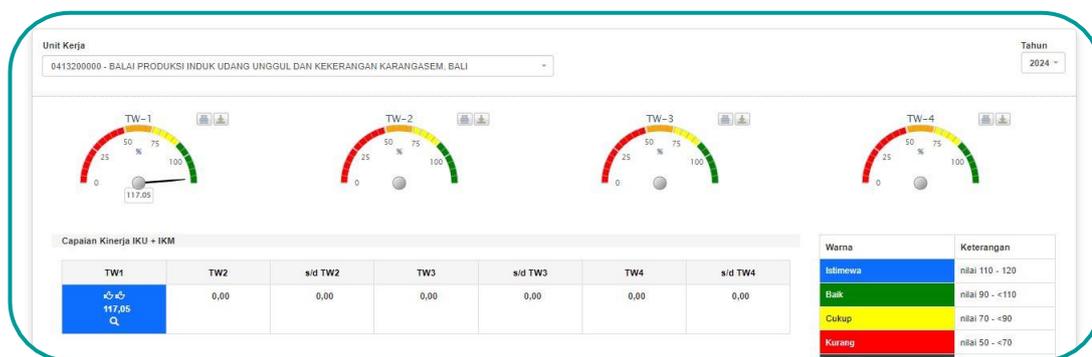
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Nilai Kinerja Organisasi

Berdasarkan aplikasi Kinerjaku.kkp diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Triwulan I Tahun 2024 yang merupakan nilai keseluruhan capaian IKU sebesar 117,05%.



Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2024	Target Maret	Capaian Maret	%	Target sid Maret	Capaian sid Maret	%	Tgl Input
S.01	Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya meningkat di BPUZK Karangasem						120,00		120,00	120,00		
IKS.1	Nilai PNBP yang diperoleh (Rupiah) Data Dukung: [✓] [📄]	Rupiah	Maximize	Nilai Posisi Aktir	723.400.000,00	137.665.000,00	164.169.067,00	120,00	137.665.000,00	164.169.067,00	120,00	16-Apr-2024 08:48
	Tambah Data Dukung											
S.02	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pemudidayaan ikan						109,80		109,80	109,80		
IKS.02.1	Calon induk unggul yang diproduksi (Ekor) Data Dukung: [✓] [📄]	Ekor	Maximize	Nilai Posisi Aktir	114.413,00	28.300,00	31.080,00	109,80	28.300,00	31.080,00	109,80	16-Apr-2024 08:48
	Tambah Data Dukung											
IKS.02.2	Persentase bantuan benih yang disalurkan (persen) Data Dukung: [✓] [📄]	Persen	Maximize	Nilai Posisi Aktir	75,00	0,00			0,00	0,00		16-Apr-2024 08:48
	Tambah Data Dukung											
IKS.02.3	Persentase bantuan calon induk yang disalurkan (persen) Data Dukung: [✓] [📄]	Persen	Maximize	Nilai Posisi Aktir	75,00	0,00			0,00	0,00		16-Apr-2024 08:48
	Tambah Data Dukung											
IKS.02.4	Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan (persen) Data Dukung: [✓] [📄]	Persen	Maximize	Nilai Posisi Aktir	100,00	0,00			0,00	0,00		16-Apr-2024 08:48
	Tambah Data Dukung											
S.03	Meningkatnya kualitas pengendalian kesehatan ikan						120,00		120,00	120,00		
IKS.03.1	Persentase layanan pengujian kesehatan ikan dan kualitas lingkungan (%) Data Dukung: [✓] [📄]	Persen	Maximize	Nilai Posisi Aktir	100,00	20,00	46,23	120,00	20,00	46,23	120,00	16-Apr-2024 08:48

	lingkup laboratorium yang terakreditasi (parameter)	Parameter	Maximize	Nilai Posisi Akhir	4,00	0,00			0,00	0,00	
	Tambah Data Dukung+										
03	Persentase bakteri patogen pada ikan yang resisten terhadap anti mikroba (AMU/AMR) (%) Data Dukung: ✓ 📄	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	10,00	37,14	120,00	10,00	37,14	120,00
	Tambah Data Dukung+										
	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BPIU2K Karangasem										
01	Indeks profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup BPIU2K (Karangasem) (Indeks)	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	85,00	0,00			0,00	0,00	18-Apr-2024 08:48
	Tambah Data Dukung+										
02	Indeks pengelolaan kepegawaian (Indeks)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	4,00	0,00			0,00	0,00	18-Apr-2024 08:48
	Tambah Data Dukung+										
03	Unit kerja yang berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	78,00	0,00			0,00	0,00	18-Apr-2024 08:48
	Tambah Data Dukung+										
04	Persentase penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan satker BPIU2K Karangasem (persen)	Persen	Minimize	Nilai Posisi Akhir	100,00	0,00			0,00	0,00	18-Apr-2024 08:48
	Tambah Data Dukung+										
05	Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PM SAKIP) BPIU2K Karangasem (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82,00	0,00			0,00	0,00	18-Apr-2024 08:48
	Tambah Data Dukung+										
06	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPIU2K Karangasem (%) Data Dukung: ✓ 📄	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	80,00	100,00	120,00	80,00	100,00	120,00
	Tambah Data Dukung+										
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPIU2K Karangasem (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	93,76	0,00			0,00	0,00	18-Apr-2024 08:48
	Tambah Data Dukung+										
IKS.04.09	Tingkat Kepuasan Pengadaan Barang/Jasa lingkup BPIU2K Karangasem (%)	Persen	Minimize	Nilai Posisi Akhir	80,00	0,00			0,00	0,00	18-Apr-2024 08:48
	Tambah Data Dukung+										
IKS.04.10	Tingkat Kepuasan Pengelolaan BMN lingkup BPIU2K Karangasem (%)	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	0,00			0,00	0,00	18-Apr-2024 08:48
	Tambah Data Dukung+										
IKS.04.11	Persentase Pelaku Usaha Budi daya ikan yang Terintegrasi KUSUKA (persen)	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	91,00	0,00			0,00	0,00	18-Apr-2024 08:48
	Tambah Data Dukung+										
IKS.04.12	Persentase Pembantuan Netral dan Positif terhadap Total pembantuan tentang sub sektor perikanan Budi Daya wilayah kerja BPIU2K Karangasem (persen) Data Dukung: ✓ 📄	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88,00	88,00	100,00	116,28	88,00	100,00	116,28
	Tambah Data Dukung+										
IKS.04.13	Nilai pengawasan kearsipan BPIU2K Karangasem (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75,00	0,00			0,00	0,00	18-Apr-2024 08:48
	Tambah Data Dukung+										
IKS.04.14	Persentase Layanan perikanan BPIU2K Karangasem (persen)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	80,00	100,00	120,00	80,00	100,00	120,00
	Tambah Data Dukung+										

Gambar 3. 1 NPSS BPIU2K Karangasem Triwulan I pada Aplikasi Kinerjaaku

Rincian capaian Nilai Kinerja Organisasi Triwulan I Tahun 2024 dengan uraian capaian pada setiap sasaran strategis sebagai berikut:



Gambar 3. 2 Rincian Nilai Kinerja Organisasi

Adapun rincian dan perbandingan capaian kinerja Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekekran (BPIU2K) Karangasem sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 1 Capaian IKU sampai dengan Triwulan I

NO	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024	Target TW I	Capaian s.d TW I	% Capaian TW I	% Capaian Tahunan
1	Nilai PNBP yang Diperoleh BPIU2K Karangasem (Rupiah)	723.400.000	137.585.000	184.168.067	133,86	25,46
2	Calon Induk Unggul Yang Diproduksi (Ekor)	114.413	28.306	31.080	109,80	27,16
3	Persentase Bantuan Benih yang Disalurkan (Persen)	75				
4	Persentase Bantuan Calon Induk Yang Disalurkan (Persen)	75				
5	Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran Ikan (Persen)	100				
6	Persentase layanan pengujian kesehatan ikan dan kualitas lingkungan (%)	100	20	46,23	231,15	46,23
7	Ruang lingkup laboratorium yang terakreditasi (parameter)	4				
8	Persentase bakteri patogen pada ikan yang resisten terhadap anti mikroba (AMU/AMR) (%)	100	10	37,14	371,40	37,14
9	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) BPIU2K Karangasem (%)	85				
10	Indeks Pengelolaan Kepegawaian (indeks)	4				
11	Unit Kerja yang Berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (Nilai)	76				
12	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BPIU2K Karangasem (Persen)	100				
13	Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PM SAKIP) BPIU2K Karangasem (Nilai)	82				
14	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPIU2K Karangasem (%)	80	80	100	125,00	125,00
15	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPIU2K Karangasem (Nilai)	93,76				
16	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup BPIU2K Karangasem (Nilai)	86				
17	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPIU2K Karangasem (Nilai)	80				
18	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BPIU2K Karangasem (Nilai)	80				
19	Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (Persen)	91				

NO	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024	Target TW I	Capaian s.d TW I	% Capaian TW I	% Capaian Tahunan
20	Persentase Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Wilayah Kerja BPIU2K Karangasem (Persen)	>86	>86	100	116,28	116,28
21	Nilai Pengawasan Kearsipan BPIU2K Karangasem (Nilai)	75				
22	Persentase Layanan Perkantoran BPIU2K Karangasem (Persen)	80	80	100	125,00	125,00

3.2. Analisis Capaian Kinerja

3.2.1. Sasaran Kegiatan (SK-1): Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya meningkat di BPIU2K Karangasem

IKU 1. Nilai PNBP yang diperoleh (Rupiah)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Pedoman Umum dan PNBP Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 tahun 2022 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka sumber PNBP lingkup BPIU2K Karangasem adalah PNBP Non SDA yakni PNBP yang berasal dari penjualan hasil usaha budidaya dan imbalan jasa lingkup BPIU2K Karangasem. PNBP ini terdiri dari:

- (i) Penjualan Hasil Perikanan Budidaya;
- (ii) Jasa Penggunaan Laboratorium;
- (iii) Jasa Penggunaan Fasilitas; dan
- (iv) Jasa Fasilitas Lainnya.

Pada APBN Tahun 2024, nilai PNBP BPIU2K Karangasem ditargetkan sebesar Rp723.400.000. Upaya untuk mencapai target tersebut perlu dilakukan pengelolaan PNBP yang optimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang menyatakan bahwa PNBP meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Target dan realisasi PNBP BPIU2K Karangasem sampai dengan Triwulan I disajikan pada Tabel 3.2.



Gambar 3. 3 Capaian Nilai PNBP BPIU2K Karangasem

Pada periode triwulan I, Penerimaan Negara Bukan Pajak ditargetkan sebesar Rp137.585.000 dan tercapai sebesar 184.168.067 (133,86%) berdasarkan hasil monitoring capaian IKU. Capaian triwulan I tahun ini mengalami peningkatan sebesar 13,80% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Latar belakang yang mendukung ketercapaian dan peningkatan indikator ini antara lain:

- Telah disusun dan ditetapkannya rencana target yang akan dicapai setiap bulan
- Adanya penerimaan pendapatan negara dari penjualan alat dan mesin, serta penerimaan belanja pegawai
- Adanya peningkatan penerimaan pendapatan negara dari pengujian laboratorium dan sewa rumah dinas

Tabel 3. 2 Rincian penerimaan PNBP s.d Triwulan I

NO	URAIAN	TARGET TA. 2024 (Rp)	PNBP s/d Triwulan I (Rp)	KET
I.	Penerimaan Umum			
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (Rumah Dinas)	-	10.581.000	0,00%
2	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	3.388.597	0,00%
	Jumlah Penerimaan Umum	-	13.969.597	0,00%
II.	Penerimaan Fungsional			
1	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Dengan Tusi	1.200.000	-	0,00%
2	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	637.700.000	101.835.000	15,97%
3	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standarisasi	84.500.000	67.860.000	80,31%
	Jumlah Penerimaan Fungsional	723.400.000	169.695.000	23,46%
III.	Penerimaan Non Anggaran			
1	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	503.470	0,00%
	Jumlah Penerimaan Non Anggaran	-	503.470	0,00%
	Jumlah Total (Rupiah)	723.400.000	184.168.067	25,46%

Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian IKU ini yaitu melakukan publikasi jenis layanan yang tersedia di Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Keherangan Karangasem di media sosial dan media publikasi elektronik di Kabupaten Karangasem.



Publikasi jenis layanan BPIU2K Karangasem di ¹⁾ media sosial, ²⁾ media elektronik milik Pemerintah Kabupaten Karangasem

Gambar 3. 4 Publikasi layanan dan PNBP

Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) selain melakukan publikasi pada media sosial dan elektronik antara lain:

1. Pengelolaan PNBP Didukung oleh Sumberdaya Manusia (SDM) yang kompeten seperti bendahara PNBP yang tersertifikasi Badan Negara Tersertifikasi (BNT) oleh Kementerian Keuangan. Pelayanan jasa uji laboratorium yang didukung oleh akreditasi ISO 17025:2017 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN)
2. Pengelolaan Barang Milik Negara yang dalam kondisi tidak termanfaatkan sehingga dilakukan lelang dan menambah nilai PNBP



Beberapa dokumentasi kegiatan penerimaan PNBP antarlain berupa ¹⁾ penerimaan sampel uji oleh petugas penerima sampel, ²⁾ Pengujian sampel oleh tim laboratorium, ³⁾ Rumah dinas yang dipungut biaya sewa, ⁴⁾ Panen udang vaname konsumsi

Gambar 3. 5 Kegiatan Penerimaan PNBP BPIU2K Karangasem

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada periode triwulan II yaitu melakukan publikasi pelayanan melalui kegiatan *Goes to Campus* di wilayah Bali untuk memperkenalkan jasa dan pelayanan yang tersedia di Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem.

Tabel 3. 3 Perbandingan realisasi Triwulan I Tahun 2023 dan 2024

JENIS PENERIMAAN	REALISASI		JUSTIFIKASI/PENJELASAN
	Triwulan I 2023	Triwulan I 2024	
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	Rp5.339.800	Rp10.581.000	Mengalami peningkatan karena terdapat perhitungan tarif sewa rumah dinas yang baru berdasarkan HSBGN yang ditetapkan oleh Bupati Kab. Karangasem.
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	3.388.597	Adanya penjualan Barang Milik Negara melalui mekanisme lelang.
Pendapatan Penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan Tusi	400.000	-	Penurunan penerimaan diakibatkan tidak adanya mahasiswa yang menggunakan sarana dan prasarana ketika pelaksanaan magang/PKL
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	Rp137.240.000	Rp101.835.000	Mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya karena permintaan dari <i>stakeholder</i> mengalami penurunan.
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya.	Rp18.850.000	Rp67.860.000	Mengalami peningkatan karena <i>stakeholder</i> atau petambak memasuki masa tebar.
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	Rp503.470	Adanya penerimaan belajar pegawai berupa uang makan pada TAYL

584	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin	Rp 1.214.288.000	Rp 336.480.069	27,71	CAPAI
I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 1.214.288.000	Rp 336.480.069	27,71	
II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp -		
538911	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu	Rp 1.212.600.000	Rp 103.429.321	8,53	CAPAI
I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 1.212.600.000	Rp 101.369.694	8,36	
II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 2.059.627		
567720	Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	Rp 968.400.000	Rp 169.655.009	17,52	CAPAI
I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 968.400.000	Rp 157.915.445	16,31	
II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 11.739.564		
567762	Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Rp 781.085.000	Rp 368.765.482	47,21	CAPAI
I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 781.085.000	Rp 201.370.232	25,78	
II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 167.395.250		
567800	Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang	Rp 1.100.000.000	Rp 295.242.070	26,84	CAPAI
I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 1.100.000.000	Rp 295.242.070	26,84	
II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp -		
445394	Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem	Rp 723.400.000	Rp 184.168.067	25,46	CAPAI
I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 723.400.000	Rp 183.864.597	25,39	
II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 503.470		

Nilai PNBP BPIU2K Karangasem berdasarkan Surat Dinas DJPB No: B.2528/DJPB.1/KU.340/IV/2024 Tanggal 16 April 2024

Gambar 3. 6 Nilai PNBP BPIU2K Karangasem

3.2.2. Sasaran Kegiatan (SK-2): Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan

IKU 2. Calon induk unggul yang diproduksi (Ekor)

Produksi calon induk unggul adalah jumlah calon induk unggul yang dihasilkan oleh BPIU2K Karangasem yang kemudian dimanfaatkan dalam pemenuhan bantuan calon induk unggul dan penjualan untuk pemenuhan target Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pada tahun 2024, BPIU2K Karangasem ditargetkan untuk memproduksi calon induk sebanyak 114.413 ekor yang tertuang sebanyak 100% dalam target Perjanjian Kinerja. Target ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan target pada tahun 2023 hanya 111.502 ekor. Untuk mendukung realisasi target ini BPIU2K Karangasem mengalokasikan anggaran sebesar Rp5.016.714.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.137.174.302 (62,53%) sampai dengan Triwulan I.



Gambar 3. 7 Produksi calon induk unggul

Capaian produksi calon induk unggul sampai dengan Triwulan I tercapai sebanyak 31.080 ekor dengan persentase capaian 109,80%, dengan detail produksi calon induk udang vaname sebanyak 30.897 ekor (27,13%), tiram mutiara sebanyak 28 ekor (18,67%), dan abalon sebanyak 155 ekor (38,94%).

BULAN : MARET
TA : 2024
Kementerian : Kementerian Kelautan dan Perikanan
Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
Satker/UPT : Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan (BPIU2K) Karangasem
Provinsi : Bali

NO	URAIAN	TARGET TA. 2024	RENCANA			REALISASI			Persentase %
			s/d Bulan Lalu	Bulan Ini	s/d Bulan ini	s/d Bulan Lalu	Bulan ini	s/d Bulan ini	
CALON INDUK UNGGUL									
I. AIR PAYAU									
1	Calon Induk Unggul Udang Vaname	113.865	19.000	9.175	28.175	19.996	10.901	30.897	27,13%
II. AIR LAUT									
1	Calon Induk Unggul Tiram Mutiara	150	25	12	37	20	8	28	18,67%
2	Calon Induk Unggul Abalone	398	62	32	94	120	35	155	38,94%
Jumlah Total		114.413	19.087	9.219	28.306	20.136	10.944	31.080	27,16%

Karangasem, 2 April 2024
Ketua Pokja

Nilai PNPB BPIU2K Karangasem berdasarkan Surat Dinas BPIU2K Karangasem No: B.554/BPIU2K.K/PB.140/IV/2024 Tanggal 2 April 2024

Gambar 3. 8 Produksi Calon Induk Unggul

Capaian produksi calon induk unggul secara umum didukung oleh ketersediaan sarana prasarana dan sumberdaya manusia. Beberapa hal yang melatarbelakangi ketercapaian produksi calon induk unggul triwulan ini antara lain:

- a. Penyusunan perencanaan dan target produksi dilakukan di awal tahun
- b. Pengadaan pakan pembesaran dan produksi calon induk telah dilakukan
- c. Pengiriman dan pembayaran pakan periode termin I telah dilakukan
- d. Pengelolaan pengadaan pakan segar yang sesuai untuk kebutuhan produksi

Meskipun target produksi calon induk unggul dapat dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada pelaksanaan produksi triwulan I, antara lain:

- a. Fasilitas pemeliharaan calon induk udang vaname sudah lama dan beberapa mengalami kerusakan
- b. Ketersediaan induk tiram mutiara yang matang gonad sangat terbatas
- c. Survival Rate abalon masih rendah (3-4%)

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala:

- a. Menyusun rencana pembangunan kembali fasilitas pemeliharaan calon induk udang vaname yang dalam kondisi rusak untuk didiskusikan lebih lanjut dengan *Ocean Institute* (OI)
- b. Menyusun rencana pemindahan stok tiram mutiara ke perairan daerah Belah Batu, Karangasem
- c. Menyusun rencana perbaikan kegiatan produksi pakan alami untuk benih abalon

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja, antara lain:

- a. Pelaksanaan kegiatan produksi calon induk unggul yang sesuai prosedur
- b. Penerapan *biosecurity* pada lingkungan pemeliharaan
- c. Monitoring dan pengawasan hasil produksi calon induk unggul secara rutin

Rekomendasi rencana aksi terkait pencapaian IKU ini pada triwulan berikutnya antara lain:

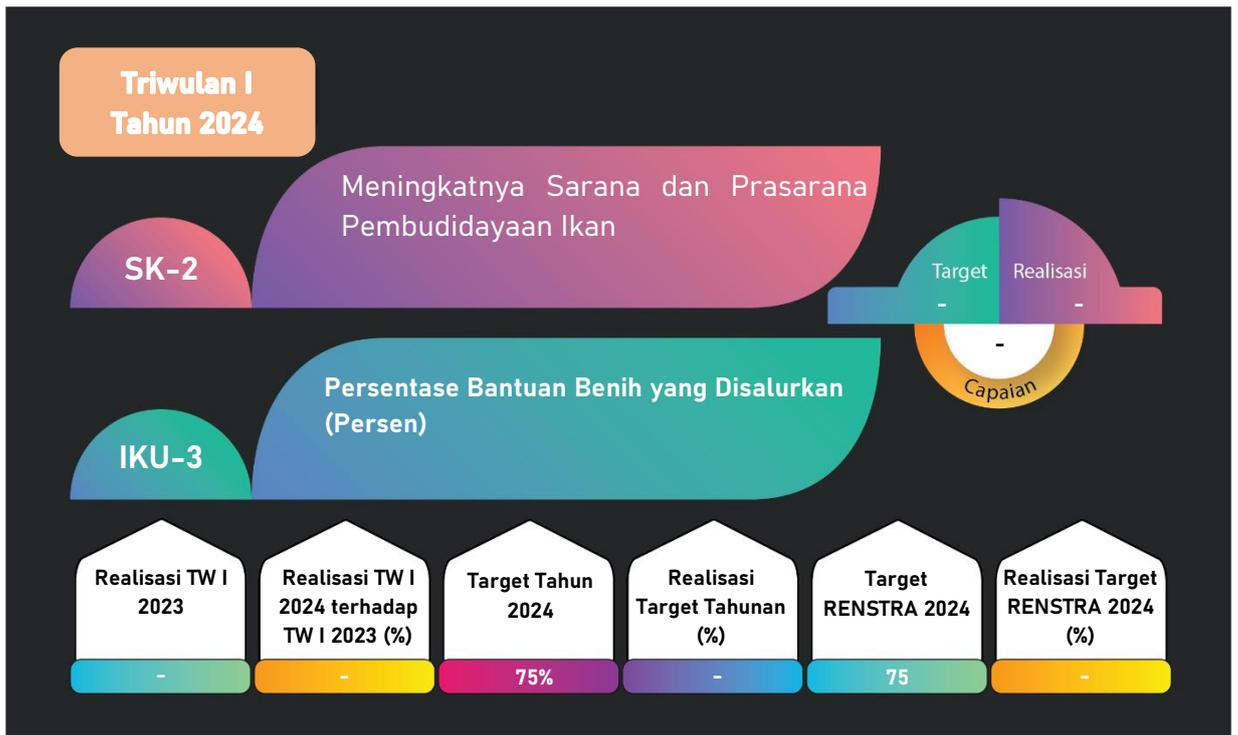
- a. Melaksanakan diskusi dengan tim *Ocean Institue (OI)* terkait perkembangan pembangunan fasilitas produksi dan pemeliharaan calon induk udang vaname
- b. Melaksanakan koordinasi kepada penyedia barang dan jasa terkait pengiriman dan pembayaran pakan pembesaran
- c. Melaksanakan diskusi lanjutan untuk proses pemindahan induk tiram mutiara ke lingkungan perairan yang baru

IKU 3. Persentase bantuan benih yang disalurkan (persen)

Program bantuan benih dan calon induk ikan adalah salah satu kegiatan prioritas andalan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bantuan benih bermutu dihasilkan dari induk unggul pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT). Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Keheranan Karangasem sebagai salah satu UPT DJPB turut mendukung program tersebut dan ditetapkan sebagai salah satu indikator utama pada Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan program distribusi bantuan pemerintah, BPIU2K Karangasem melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap calon penerima bantuan yang telah diusulkan. Melalui Tim Bantuan Pemerintah BPIU2K Karangasem memeriksa persyaratan administrasi dan teknis calon penerima bantuan. Penerima bantuan yang telah memenuhi persyaratan akan menerima jadwal distribusi bantuan.

Pada awal Tahun 2024 BPIU2K Karangasem menetapkan target bantuan benih yang disalurkan sebanyak 75% yang mencakup komoditas udang vaname, abalon, dan tiram mutiara. Untuk mendukung realisasi target ini, Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Keheranan Karangasem mengalokasikan pagu anggaran sebesar Rp800.941.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp538.263.476 (67,20%). Kegiatan seperti pengadaan sarana dan prasarana pendukung produksi secara keseluruhan telah selesai dilaksanakan. Sisa pagu hanya terdiri dari belanja barang operasional rutin atau bulanan. Realisasi indikator ini diukur secara semesteran.



Gambar 3. 9 Capaian bantuan benih yang disalurkan

Pada Triwulan I tidak terdapat penetapan target dan capaian atas indikator bantuan benih yang disalurkan karena pengukuran dilakukan secara semesteran. Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian indikator tersebut sampai dengan triwulan I, antara lain:

- a. Telah dilakukan identifikasi kelompok calon penerima bantuan benih;
- b. Telah dilakukan distribusi bantuan benih udang vaname kepada 6 (enam) kelompok pembudidaya ikan dengan total benih yang disalurkan sebanyak 5.000.000 ekor.

Selama periode triwulan I tidak terdapat permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan distribusi bantuan benih. Rekomendasi rencana aksi terkait pencapaian IKU tersebut pada triwulan berikutnya antara lain:

- a. Menyelenggarakan distribusi bantuan benih tiram mutiara dan abalon kepada calon penerima di Kabupaten Lombok Barat dan Jembrana;
- b. Menyelenggarakan distribusi bantuan benih udang kepada calon penerima di Provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat.

IKU 4. Persentase Bantuan Calon Induk Yang Disalurkan

Indikator ini merupakan indikator lainnya untuk mendukung pencapaian program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui DJPB. Pada pelaksanaan program distribusi bantuan pemerintah, BPIU2K Karangasem melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap calon penerima bantuan yang telah diusulkan. Melalui Tim Bantuan Pemerintah BPIU2K Karangasem memeriksa persyaratan administrasi dan teknis calon penerima bantuan. Penerima bantuan yang telah memenuhi persyaratan akan menerima jadwal distribusi bantuan.

Pada awal Tahun 2024 BPIU2K Karangasem bantuan calon induk unggul yang tersalurkan ke masyarakat memiliki target sebanyak 75% khusus untuk komoditas udang vaname. Untuk mendukung realisasi target ini, Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem mengalokasikan pagu anggaran sebesar Rp269.089.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp197.336.062 (73,33%). Kegiatan seperti pengadaan sarana dan prasarana pendukung produksi secara keseluruhan telah selesai dilaksanakan. Sisa pagu hanya terdiri dari belanja barang operasional rutin yang diadakan secara termin/bertahap atau bulanan.



Gambar 3. 10 Capaian bantuan calon induk unggul yang tersalurkan

Pada Triwulan I tidak terdapat penetapan target dan capaian atas indikator bantuan calon induk yang disalurkan karena pengukuran dilakukan secara semesteran. Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian indikator tersebut sampai dengan triwulan I, antara lain:

- c. Telah dilakukan identifikasi kelompok calon penerima bantuan calon induk;
- d. Telah dilakukan distribusi bantuan calon induk udang vaname kepada 3 (tiga) kelompok pembudidaya ikan di Kabupaten Tuban dengan total calon induk yang disalurkan sebanyak 6.720 ekor (134,86%).

Target distribusi bantuan calon induk unggul secara keseluruhan telah selesai disalurkan pada periode triwulan I dengan persentase capaian 134,86%. Selama pelaksanaan tidak terdapat permasalahan yang ditemukan. Rekomendasi rencana aksi terkait IKU tersebut pada triwulan berikutnya yaitu menyelenggarakan monitoring dan evaluasi atas bantuan calon induk unggul yang telah disalurkan di Kabupaten Tuban.

IKU 5. Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran Ikan

Diseminasi teknologi pembesaran ikan merupakan kegiatan yang interaktif dalam menyampaikan informasi yang ditujukan kepada kelompok masyarakat maupun individu. Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem sebagai salah satu penghasil induk unggul dan benih bermutu diharapkan mampu menyampaik informasi teknologi terkait hal tersebut kepada masyarakat khususnya yang bergerak di bidang pembudidayaan ikan.

Indikator ini diukur secara tahunan sehingga pada periode triwulan I tidak terdapat penetapan target terhadap indikator ini. Indikator ini diukur melalui jumlah diseminasi teknologi yang disampaikan ke masyarakat dibandingkan dengan target kegiatan diseminasi teknologi dengan formulasi sebagai berikut.

$$\text{Realisasi IKU} = \frac{\text{Jumlah diseminasi teknologi yang disampaikan ke masyarakat}}{\text{Jumlah target kegiatan diseminasi teknologi}} \times 100\%$$



Gambar 3. 11 Persentase diseminasi teknologi

Indikator persentase diseminasi teknologi akan dilakukan pengukuran pada periode tahunan, sehingga tidak terdapat capaian pada triwulan I. Upaya yang telah dilakukan sampai dengan triwulan I untuk mendukung ketercapaian indikator ini adalah telah dilakukan pelaksanaan kegiatan diseminasi teknologi di 3 (tiga) lokasi yaitu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bekasi, dan Kota Kupang. Rekomendasi rencana aksi pada periode yang akan datang yaitu melaksanakan kegiatan diseminasi teknologi di Kabupaten Mojokerto.

3.2.3. Sasaran Kegiatan (SK-3): Meningkatnya kualitas pengendalian kesehatan ikan

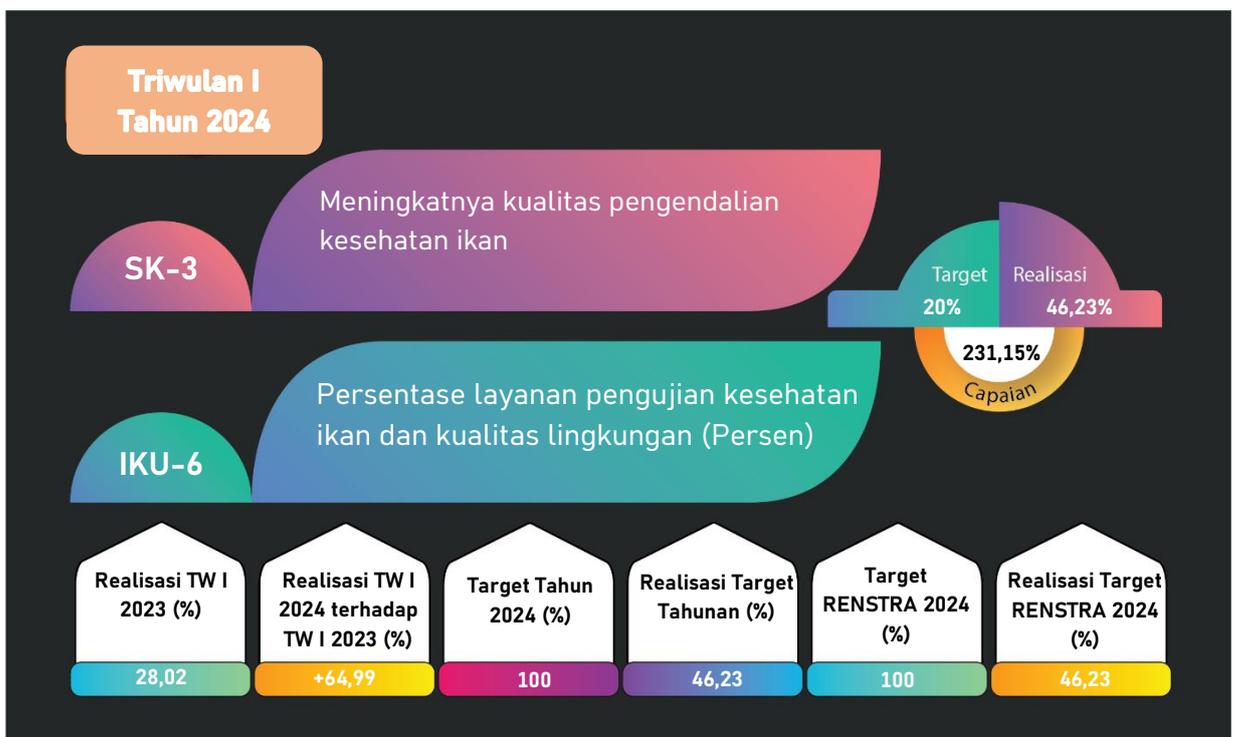
IKU 6. Persentase layanan pengujian kesehatan ikan dan kualitas lingkungan

Indikator kinerja utama ini merupakan bagian dari fungsi Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan BPIU2K Karangasem melakukan beberapa kegiatan pengujian diantaranya a) melakukan pengukuran dan pengujian kualitas air; b) melakukan pengujian biologi molekuler; c) melakukan pengujian mikrobiologi. Berikut

formulasi IKU Persentase layanan pengujian kesehatan ikan dan kualitas lingkungan:

$$\text{Realisasi IKU} = \frac{\text{Jumlah layanan kesehatan ikan \& lingkungan yang diuji}}{\text{Target sampel layanan kesehatan ikan \& lingkungan yang diuji}} \times 100\%$$

Target yang ditetapkan untuk indikator sampel layanan kesehatan ikan yang diuji adalah 904 sampel. Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan pengujian khusus kesehatan ikan sebesar Rp342.801.000 dan telah direalisasikan Rp33.927.380 (26,40%) selama periode triwulan I.

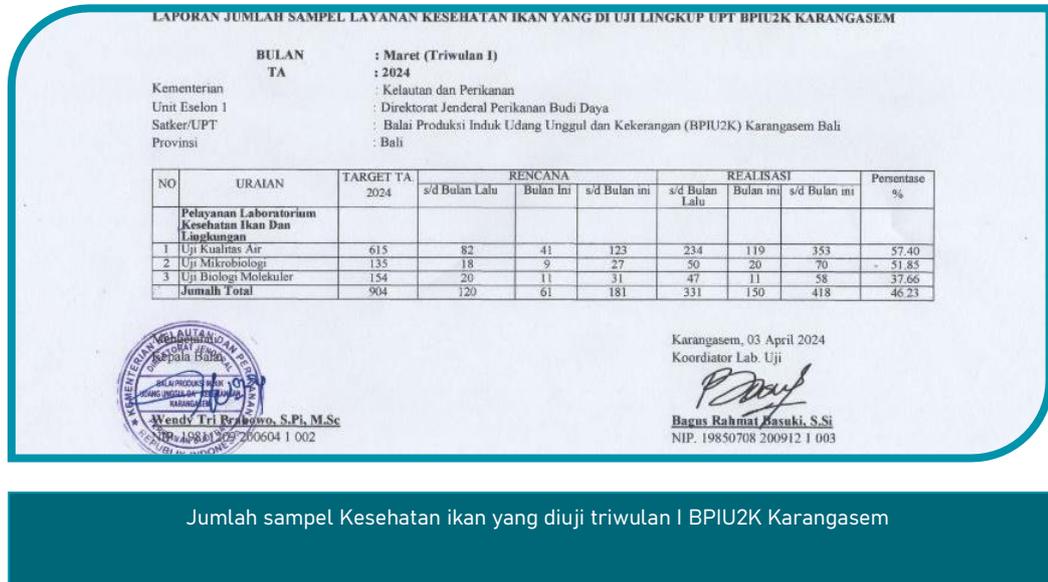


Gambar 3. 12 Layanan pengujian kesehatan ikan dan kualitas lingkungan

Capaian layanan pengujian kesehatan ikan dan kualitas lingkungan sampai dengan triwulan I tercapai sebanyak 418 sampel (46,23%) dengan persentase capaian 231,15%, dengan detail jumlah sampel kualitas air 353 sampel (57,40%), mikrobiologi 70 sampel (51,85%), dan biologi molekuler 58 sampel (37,66%). Beberapa hal yang melatarbelakangi ketercapaian layanan pengujian kesehatan ikan dan kualitas lingkungan antara lain:

- a. Penyusunan perencanaan dan target produksi dilakukan di awal tahun;

- b. Pengadaan barang berupa bahan pengujian telah dilakukan di awal tahun sehingga mampu memenuhi kebutuhan pengujian sampel.



Gambar 3. 13 Produksi Calon Induk Unggul

Secara keseluruhan tidak terdapat kendala yang ditemukan pada pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target IKU tersebut. Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja, antara lain:

- a. Mempertahankan akreditasi Laboratorium Uji (ISO 17025:2017) sehingga *stakeholder* atau pembudidaya ikan menaruh kepercayaan untuk melakukan menggunakan jasa uji laboratorium di Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Keckerangan Karangasem.
- b. Pengujian kesehatan dan lingkungan secara rutin pada kegiatan produksi benih dan calon induk udang di Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Keckerangan Karangasem.

Rekomendasi rencana aksi terkait pencapaian IKU tersebut pada triwulan berikutnya antara lain:

- a. Melaksanakan permintaan rekomendasi produk impor untuk pengadaan bahan pengujian
- b. Melakukan pengadaan tes kit atau bahan untuk pengujian penyakit
- c. Melakukan monitoring lingkungan di perairan Bali



Pelaksanaan kegiatan uji sampel oleh tim laboratorium uji

Gambar 3. 14 Kegiatan dalam rangka pelayanan laboratorium uji

IKU 7. Ruang Lingkup Laboratorium yang Terakreditasi

Ruang lingkup laboratorium yang terakreditasi merupakan jumlah parameter uji yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) di Laboratorium Uji Balai Produksi Induk Unggul dan Keckerangan Karangasem. Anggaran yang disediakan untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp75.000.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp925.000 (1,23%).



Gambar 3. 15 Ruang Lingkup Laboratorium yang Terakreditasi

Berikut formulasi IKU Ruang Lingkup Laboratorium yang Terakreditasi:

$$\text{Realisasi IKU} = \frac{\text{Jumlah parameter uji yang terakreditasi}}{\text{Target jumlah parameter uji yang terakreditasi}} \times 100\%$$

Pengukuran target indikator ini dilakukan secara tahunan sehingga pada triwulan I belum terdapat penetapan dan pengukuran target. Upaya yang telah dilakukan sampai dengan triwulan ini untuk mendukung ketercapaian indikator tersebut antara lain:

- a. Melaksanakan kegiatan pengujian sesuai dengan Panduan Mutu yang telah ditetapkan
- b. Membuat dan melengkapi dokumen sesuai ketentuan dan persyaratan

IKU 8. Persentase bakteri patogen pada ikan yang resisten terhadap anti mikroba (AMU/AMR) (persen)

Persentase bakteri patogen pada ikan yang resisten terhadap anti mikroba (AMU/AMR) adalah upaya pengendalian lingkungan melalui pengujian *Anti Microbial Resistance* (AMR) yang dilakukan oleh Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan BPIU2K Karangasem. Target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebanyak 35 sampel dengan formulasi perhitungan capaian sebagai berikut:

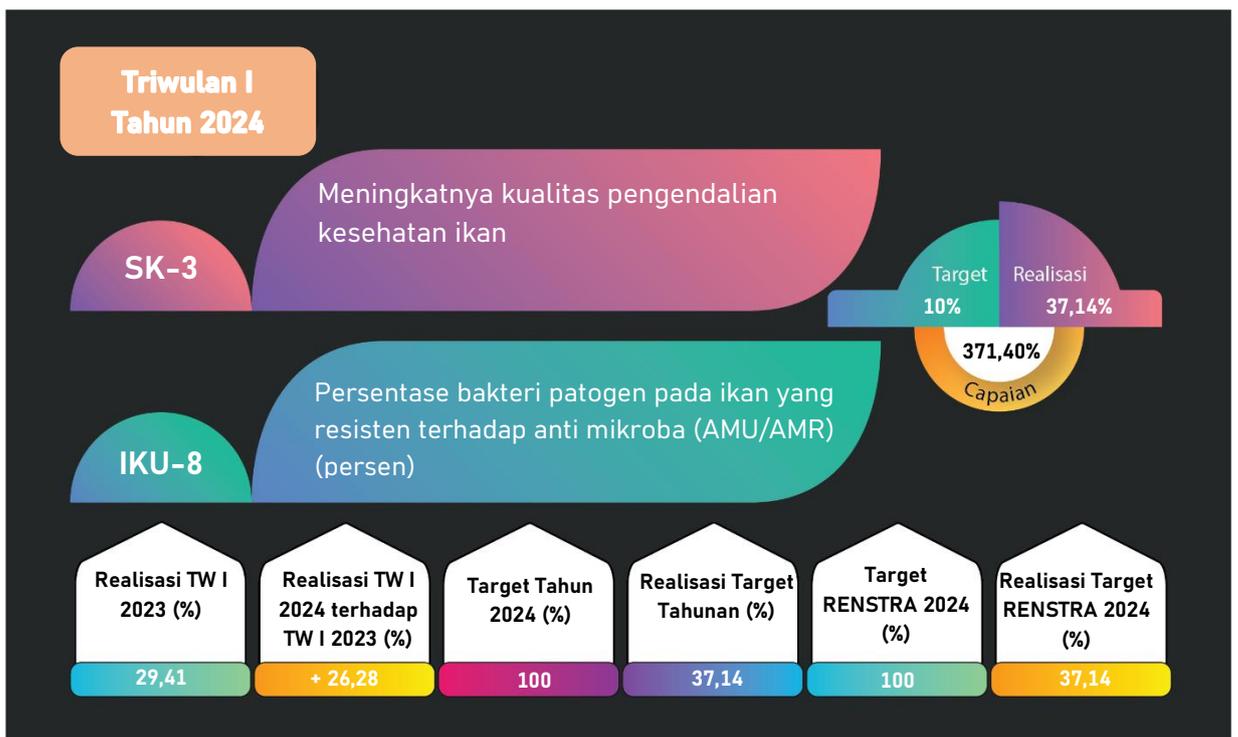
$$\text{Realisasi IKU} = \frac{\text{Jumlah sampel ikan yang diuji AMR}}{\text{Target jumlah sampel ikan yang diuji AMR}} \times 100\%$$

Alokasi anggaran yang digunakan untuk menguji sampel AMR sebesar Rp31.075.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp16.571.340 (53,33%) yang dikhususkan untuk operasional pengujian sampel, perjalanan pengambilan sampel, dan bahan uji AMU/AMR.



Jumlah AMR triwulan I BPIU2K Karangasem

Gambar 3. 16 Produksi Calon Induk Unggul



Gambar 3. 17 Persentase Pengujian AMR

Capaian persentase bakteri patogen pada ikan yang resisten terhadap anti mikroba (AMU/AMR) sampai dengan triwulan I tercapai sebanyak 13 sampel (37,14%) dengan persentase capaian 371,40% dan meningkat sebesar 26,28% jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya.

Hal yang melatarbelakangi ketercapaian jumlah sampel bakteri patogen yang resisten terhadap anti mikroba (AMU/AMR) periode triwulan I yaitu telah dilakukan monitoring dan uji bakteri patogen terhadap anti mikroba (AMU/AMR) di Kabupaten Jembrana pada 11 (sebelas) lokasi pembudidayaan udang vaname. Pada pelaksanaan periode triwulan I tidak ditemukan kendala untuk merealisasikan target indikator tersebut.

Rekomendasi rencana aksi pada periode triwulan berikutnya antara lain melaksanakan monitoring AMU/AMR di lokasi budidaya udang lainnya pada wilayah Bali dan atau wilayah lain yang dianggap perlu untuk dilakukan monitoring AMU/AMR.



Pelaksanaan pengambilan dan pengujian sampel sebagai bentuk pengendalian AMR

Gambar 3. 18 Pengambilan dan Pengujian AMR

3.2.4. Sasaran Kegiatan (SK-4): Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di BPIU2K Karangasem

Sasaran kegiatan ini terdiri dari indikator kinerja utama yang merupakan bagian dari program dukungan manajemen internal. Untuk merealisasikan target yang ditetapkan, kegiatan yang mencakup pada sasaran kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp10.319.703.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.360.071.477 (22,87).

IKU 9. Indeks profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup BPIU2K Karangasem

Indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indeks profesionalitas ASN diukur menggunakan

standar profesionalitas ASN. Standar profesional ASN terdiri dari empat dimensi (www.menpan.go.id), yaitu:

1) Kualifikasi

Kualifikasi merupakan dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan/atau keahlian khusus, sehingga seseorang tersebut mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai tugas jabatannya. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenjang riwayat pendidikan terakhir yang dicapai oleh PNS. Bobot dimensi ini sebesar 25%, dengan besaran sub-bobot (i) S-3 sebesar 25%; (ii) S-2 sebesar 20%; (iii) S-1/D-IV sebesar 15%; (iv) D-III sebesar 10%; (v) SLTA/D-I/D-II/ sederajat sebesar 5%; dan dibawah SLTA sebesar 1%.

2) Kompetensi

Kompetensi merupakan dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan yang tercermin melalui perilaku kinerja, yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenis diklat yang pernah diikuti seperti diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis, kursus, dan seminar/ workshop/magang/sejenis. Bobot dimensi ini sebesar 40% dengan besaran sub-bobot:

(i) Pejabat Struktural (40%)

Telah mengikuti Diklat Kepemimpinan/sejenis sebesar 15%; Telah mengikuti Diklat Teknis yang sesuai dengan tugas jabatan minimal 20 jam pelajaran dalam 1 tahun terakhir sebesar 15%; Telah mengikuti kegiatan Seminar/Workshop/sejenis untuk mendukung tugas jabatan dalam 2 tahun terakhir sebesar 10%;

(ii) Pejabat Fungsional Tertentu (40%)

Mengikuti Diklat Jabatan Fungsional yang sesuai dengan jenjang jabatannya sebesar 15%; Mengikuti Diklat Teknis yang sesuai dengan tugas jabatan minimal 20 jam pelajaran dalam 1 tahun terakhir sebesar 15%; Telah mengikuti kegiatan Seminar/Workshop/sejenis untuk mendukung tugas jabatan dalam 2 tahun terakhir sebesar 10%;

(iii) Pejabat Fungsional Umum (40%)

Telah mengikuti Diklat Teknis yang sesuai dengan tugas jabatan minimal 20 jam pelajaran dalam 1 tahun terakhir, sebesar 30%; Telah mengikuti kegiatan Seminar/Workshop/sejenis untuk mendukung tugas jabatan dalam 2 tahun terakhir, sebesar 10%

3) Kinerja

Kinerja merupakan dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit kerja atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Alat ukur yang digunakan adalah rata-rata kinerja individu pada suatu unit kerja. Bobot dimensi ini sebesar 30% dengan besaran sub-bobot didasarkan pada capaian hasil SKP (60%) dan hasil penilaian perilaku 360° (40%) : (i) hasil penilaian kinerja 90 s.d. 100 sebesar 30%; (ii) hasil penilaian kinerja 76 s.d. 90 sebesar 25%; (iii) hasil penilaian kinerja 61 s.d. 76 sebesar 15%; (iv) hasil penilaian kinerja 51 s.d. 60 sebesar 5%; dan (v) hasil penilaian kinerja 50 ke bawah sebesar 1%;

4) Disiplin

Disiplin merupakan dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan, apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan. Alat ukur yang digunakan adalah persentase jumlah PNS yang memperoleh hukuman disiplin berdasarkan tingkatan hukuman disiplin. Bobot dimensi ini sebesar 5%, dengan besaran sub-bobot didasarkan pada pernah atau tidak pernah seorang ASN dikenai hukuman disiplin dalam 5 tahun terakhir : (i) tidak pernah dikenai hukuman disiplin sebesar 5%; (ii) pernah dikenai hukuman disiplin ringan sebesar 3%; (iii) pernah dikenai hukuman disiplin sedang sebesar 2%; dan (iv) pernah dikenai hukuman disiplin berat sebesar 1%.

Berikut ini formulasi perhitungan untuk IKU Indeks profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup BPIU2K Karangasem:

$$\text{Nilai IP ASN} = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

$$\text{Realisasi IKU} = \sum \text{Rerata nilai IP ASN dari seluruh ASN lingkup BPIU2K Karangasem}$$



Gambar 3. 19 Indeks profesionalitas ASN

Indikator Indeks Profesionalitas ASN belum terdapat penetapan target dan pengukuran pada periode triwulan I karena indikator ini dinilai secara semesteran. Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung ketercapaian indikator ini sampai dengan triwulan I antara lain:

- Melaksanakan pengukuran capaian Sasaran Kinerja Pegawai dan Kinerja Organisasi periode Triwulan IV Tahun 2023;
- Sosialisasi kode etik kepada seluruh pegawai lingkup BPIU2K Karangasem.

Rekomendasi rencana aksi pada periode triwulan berikutnya antara lain:

- Melaksanakan pengukuran capaian Sasaran Kinerja Pegawai dan Kinerja Organisasi periode Triwulan I Tahun 2024;
- Menginstruksikan kepada seluruh ASN lingkup BPIU2K Karangasem untuk mengikuti kegiatan seminar, workshop, dan atau diklat untuk memenuhi nilai kompetensi pegawai.

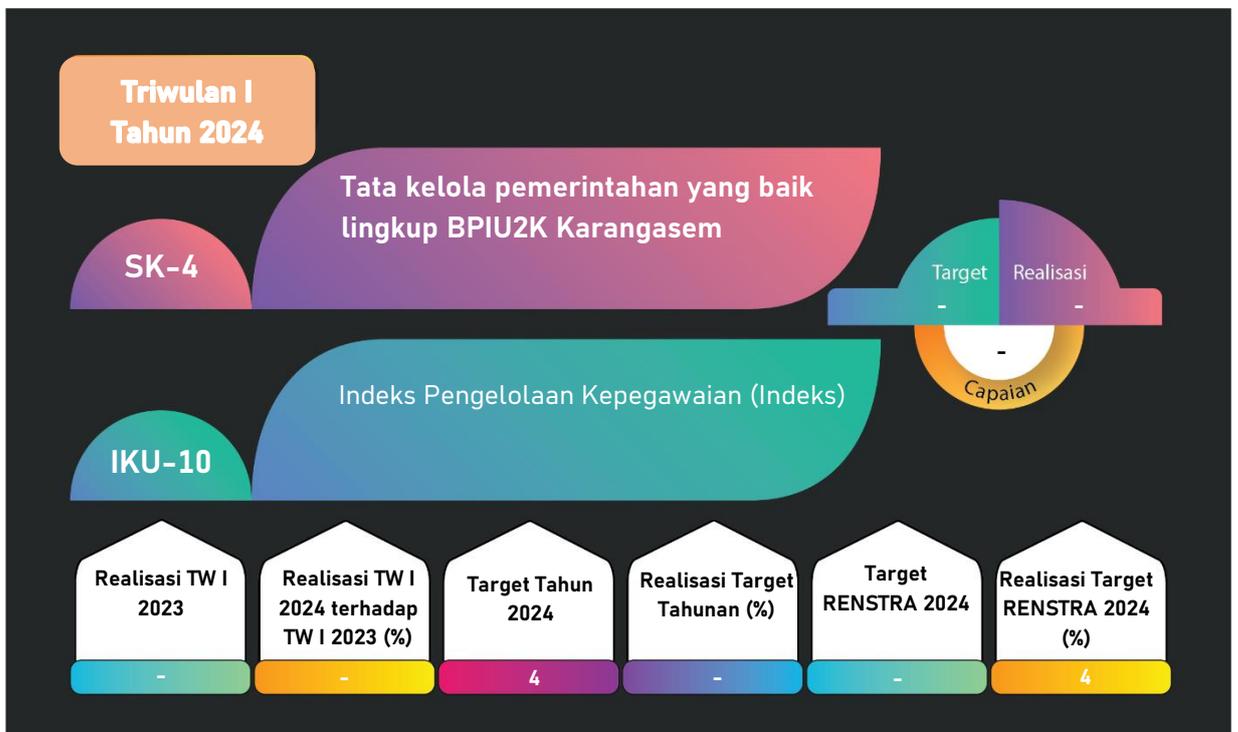


Pelaksanaan Sosialisasi Kode Etik kepada seluruh pegawai

Gambar 3. 20 Sosialisasi Kode Etik Pegawai

IKU 10. Indeks Pengelolaan Kepegawaian

Indikator ini merupakan kegiatan dalam pengukuran kualitas proses pengelolaan SDM aparatur, yang menyatakan tingkat penyimpangan proses dalam standar mutu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada indikator ini yang menjadi dasar pengukuran terkait penyelesaian SK mutasi dan dokumen ketatausahaan yang diverifikasi. Pada indikator ini tidak terdapat anggaran yang dikhususkan untuk pencapaian target.



Gambar 3. 21 Indeks pengelolaan kepegawaian

Sampai dengan Triwulan I belum terdapat target yang ditetapkan karena pengukuran dilakukan secara tahunan. Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini adalah melakukan *update* data pegawai pada Tahun 2024, melakukan penyampaian SK PPPK dan melaksanakan pengambilan sumpah PPPK untuk 6 (enam) pegawai. Rekomendasi rencana aksi pada periode berikutnya yaitu melakukan penyelesaian kenaikan pangkat pegawai yang tertunda atas nama RB. Moh Suyuti. Tidak terdapat anggaran khusus yang diperuntukkan merealisasikan indikator kinerja ini.

IKU 11. Unit kerja yang berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Indikator ini merupakan predikat yang didapatkan oleh unit kerja sebagai wilayah Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Predikat didapatkan melalui penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal KKP (Inspektorat V) atau Tim Penilai Nasional (Kementerian PAN dan RB) yang ditetapkan dalam SK dan/atau Piagam Penghargaan yang ditandatangani Menteri Kelautan dan Perikanan.



Gambar 3. 22 Hasil Penilaian Pembangunan ZI menuju WBK

Pada periode triwulan I belum terdapat penetapan target dan pengukuran pada indikator berikut karena pengukuran dilakukan periode tahunan. Upaya yang telah dilakukan selama periode triwulan I antara lain:

- a. Pembentukan tim pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi
- b. Internalisasi Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi yang diikuti seluruh pegawai
- c. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja Wilayah Bebas dari Korupsi

Rekomendasi rencana aksi pada periode triwulan yang akan datang, antara lain:

- a. Melaksanakan sosialisasi inovasi pelayanan kepada *stake holder*
- b. Meningkatkan kompetensi pegawai dalam memberikan pelayanan prima
- c. Studi banding pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi

IKU 12. Persentase penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan satker BPIU2K Karangasem

Persentase penyelesaian LHP BPK lingkup BPIU2K Karangasem adalah penyelesaian tindak lanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LK BPIU2K Karangasem sebagai pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Formulasi perhitungan persentase penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi IKU} = \frac{\text{Jumlah penyelesaian atas temuan hasil pemeriksaan laporan keuangan}}{\text{Jumlah temuan hasil pemeriksaan laporan keuangan}} \times 100\%$$



Gambar 3. 23 Persentase Penyelesaian LHP BPK

Pada periode triwulan I tidak terdapat penetapan target dan pengukuran karena indikator ini dinilai secara tahunan. Upaya yang telah dilakukan untuk meminimalisir temuan pada pemeriksaan laporan keuangan antara lain:

- a. Pengadaan Barang dan Jasa yang sesuai ketentuan dan peraturan
- b. Proses pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan

Rekomendasi tindak lanjut pada periode yang akan datang adalah melakukan proses dan kegiatan keuangan yang sesuai ketentuan dan peraturan, meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian internal terhadap semua program kegiatan baik secara administrasi keuangan maupun pelaksanaan kegiatan di lapangan.

IKU 13. Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PM SAKIP) BPIU2K Karangasem

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara

lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Evaluasi AKIP ini pada dasarnya dilakukan dengan tujuan:

- i. Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP);
- ii. Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah; dan
- iii. Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pemenuhan dokumen AKIP merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab (*good governance*) dapat diwujudkan.



Gambar 3. 24 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP

Pada periode triwulan I belum terdapat penetapan target dan pengukuran karena indikator ini dinilai secara tahunan. Upaya yang telah dilakukan pada periode triwulan I untuk mendukung kegiatan indikator ini antara lain:

- a. Penyusunan dan penetapan tim pengelolaan kinerja organisasi
- b. Penyusunan dokumen kinerja berupa Renja, Perjanjian Kinerja, Manual IKU, Rincian Target, dan Rencana Aksi
- c. Sosialisasi target kinerja Tahun 2024 kepada seluruh pegawai

Rekomendasi tindak lanjut pada periode triwulan yang akan datang untuk indikator berikut antara lain:

- a. Melakukan pengukuran kinerja organisasi dan Sasaran Kinerja Pegawai periode triwulan I tahun 2024
- b. Melakukan penyusunan laporan kinerja triwulan I tahun 2024
- c. Melakukan evaluasi atas capaian kinerja triwulan I tahun 2024

IKU 14. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPIU2K Karangasem

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti secara tuntas. Indikator kinerja ini diukur secara periode triwulanan, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi IKU} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada BPIU2K Karangasem}} \times 100\%$$

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal biasanya meliputi laporan keuangan semester dan tahunan, kualitas pelayanan publik, pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi, Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Barang Milik Negara, dan lain sebagainya.



Gambar 3. 25 Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja periode triwulan I mencapai nilai 100% dengan persentase capaian 125%. Jika dibandingkan dengan triwulan I tahun sebelumnya, capaian yang didapatkan tetap 100% atau seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan tuntas.

12	BPBAT Tatelu	100,00%
13	BPBAT Sungai Gelam Jambi	80,00%
14	BPBAT Mandiangin	100,00%
15	BPBL Ambon	100,00%
16	BPBL Lombok	100,00%
17	BPBL Batam	100,00%
18	BLUPPB Karawang	100,00%
19	BPIUUK Karangasem	100,00%
20	BPKIL Serang	100,00%

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan oleh itjen

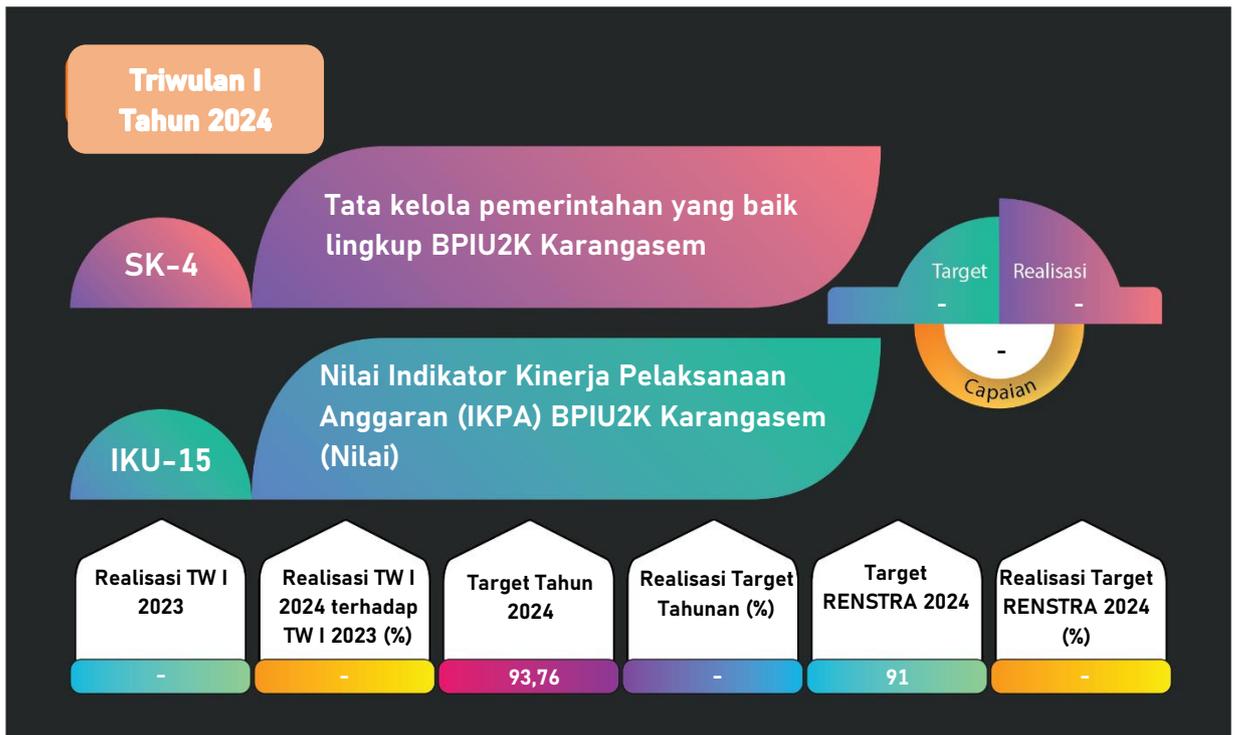
Gambar 3. 26 Capaian Indikator Kinerja sesuai Surat Dinas DJPB

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target kinerja periode triwulan I yaitu menindaklanjuti temuan Inspektorat Jenderal secara tuntas melalui aplikasi SIDAK. Pada pelaksanaannya belum terdapat kendala yang ditemukan dalam penyelesaian temuan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal. Rekomendasi rencana aksi pada periode triwulan yang akan datang adalah meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian internal melalui koordinasi secara bulanan oleh bagian keuangan dan persediaan barang hidup dan habis pakai.

IKU 15. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPIU2K Karangasem

Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur. Pengukuran dan evaluasi kinerja yang selanjutnya disebut evaluasi kinerja adalah proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga). Salah satu dasar hukum yang digunakan adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.



Gambar 3. 27 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Pada Triwulan I tidak terdapat penetapan target dan pengukuran pada indikator ini karena penilaian dilakukan secara semesteran. Upaya yang telah dilakukan periode triwulan I untuk mendukung indikator ini antara lain:

- a. Proses penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPM) sesuai dengan tata cara dan ketentuan melalui aplikasi SAKTI
- b. Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun dan direalisasikan

Rekomendasi rencana aksi pada periode yang akan datang adalah tetap melaksanakan pencairan anggaran sesuai dengan syarat dan ketentuan.

IKU 16. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup BPIU2K Karangasem (Nilai)

Nilai kinerja anggaran lingkup BPIU2K Karangasem merupakan hasil pencapaian kinerja yang dihitung berdasarkan aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) e-monev anggaran Kementerian Keuangan RI. Nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai capaian kinerja anggaran setiap variabel. Hasil pengukuran aspek impelentasi terdiri dari variabel penyerapan anggaran, konsistensi atas RPD (awal), konsistensi atas RPD (akhir), capaian keluaran, dan efisiensi.

Indikator Nilai Kinerja Anggaran belum terdapat penetapan dan pengukuran target pada Triwulan I, hal ini karena indikator ini diukur pada akhir periode tahun anggaran. Sampai dengan Triwulan I, kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung komponen penilai NKA yaitu telah melaksanakan input capaian rincian output pada aplikasi SMART setiap bulan, telah melakukan perhitungan efisiensi anggaran, telah melakukan penyusunan laporan penyerapan anggaran.



Gambar 3. 28 Nilai Kinerja Anggaran

Rekomendasi rencana aksi periode yang akan datang dalam rangka mencapai target NKA yaitu: ¹⁾Penyusunan perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan aturan, ²⁾Berorientasi pada capaian rincian output kegiatan, ³⁾Pelaksanaan anggaran direncanakan dengan baik dan jadwal pencairan sesuai RPD yang ditetapkan setiap bulan, ⁴⁾Menjalin kerjasama yang baik dengan pihak KPPN Amlapura dan Dirjen Anggaran wilayah Bali, dan ⁵⁾Sistem pelaporan keuangan yang tepat waktu.

IKU 17. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup BPIU2K Karangasem

Indikator kinerja ini adalah gambaran terkait kepatuhan Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Keckerangan Karangasem dalam pengadaan barang dan

jasa. Penilaian indikator ini dilakukan berdasarkan rencana umum pengadaan yang telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP, persentase jumlah pengadaan belaja modal yang telah dilaksanakan melalui SPSE, laporan pengadaan barang/jasa yang telah diselenggarakan, dan kesesuaian tahap pelaksanaan terhadap rencana umum pengadaan.



Gambar 3. 29 Tingkat kepatuhan pengadaan barang dan jasa

Sampai dengan Triwulan I belum ada penetapan target dari indikator kinerja ini karena penilaian capaian akan dilakukan pada akhir tahun anggaran 2024. Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung kegiatan indikator ini yaitu pengadaan barang dan jasa telah dilakukan sesuai dengan ketentuan oleh Pejabat Pengadaan yang didukung oleh pegawai dari UPT DJPB lainnya (BBBAP Situbondo).

Rekomendasi rencana aksi untuk kegiatan ini di masa yang akan datang adalah melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan; melengkapi dokumen pendukung setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa.

IKU 18. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup BPIU2K Karangasem (%)

Indikator kinerja ini merupakan gambaran tingkat pengelolaan BMN lingkup BPIU2K Karangasem. Penilaian indikator ini berdasarkan pada tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023, ketersediaan usulan PSP BMN, tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali, pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2023, serta penyusunan laporan BMN yang tepat pada waktunya.



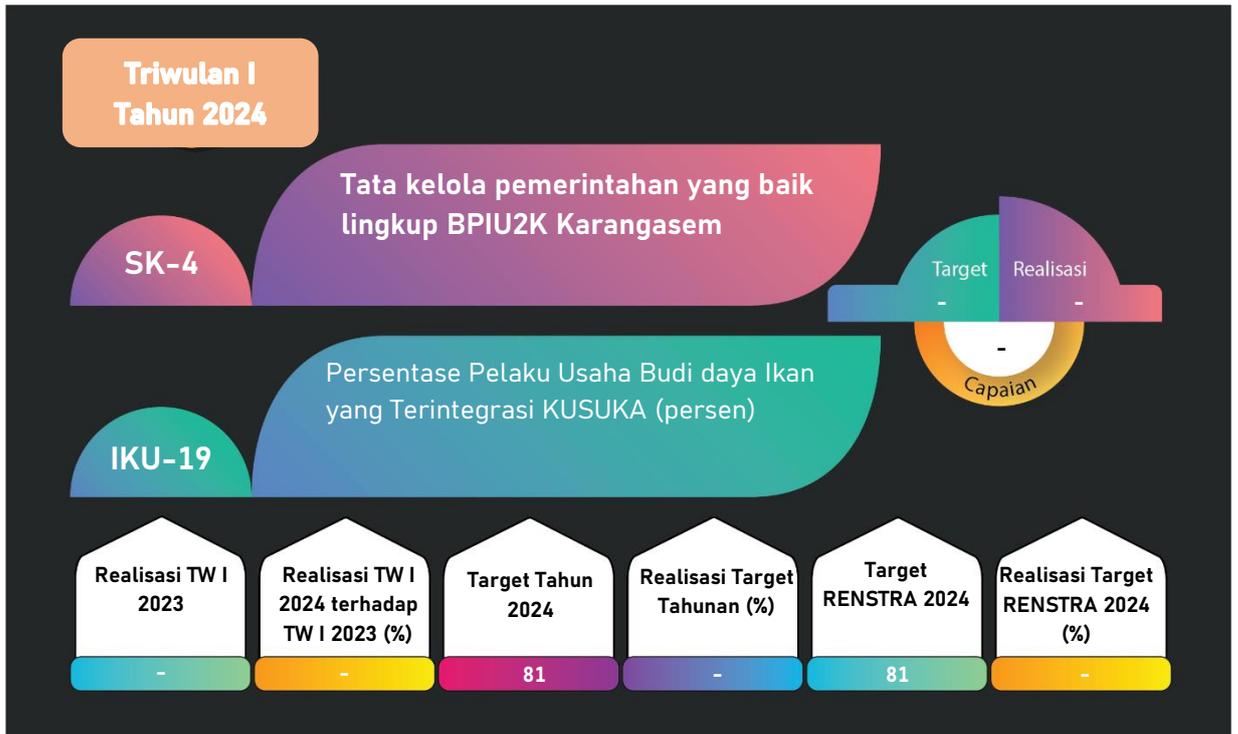
Gambar 3. 30 Tingkat kepatuhan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

Sampai dengan Triwulan I, belum ada target yang ditetapkan pada indikator kinerja ini karena penilaian capaian akan dilakukan di akhir tahun anggaran. Perkembangan kegiatan pengelolaan BMN sampai dengan Triwulan I yaitu tim Barang Milik Negara (BMN) BPIU2K Karangasem telah melaksanakan sinkronisasi dalam pelaporan barang hidup dan barang habis pakai sebagai bentuk untuk mewujudkan persamaan persepsi antara semua tim yang berkaitan.

Rencana aksi pada masa yang akan datang yaitu memaksimalkan pemanfaatan RKBMN, melakukan usulan Penetapan Status Penggunaan barang yang dilengkapi dengan BAST kepada pengguna atau pengelola barang.

IKU 19. Persentase Pelaku Usaha Budi daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA

Indikator ini merupakan penilaian atas capaian pendataan pelaku usaha yang telah mendapatkan kartu KUSUKA secara elektronik. Pendataan pelaku usaha bertujuan untuk mengumpulkan data pelaku usaha kelautan dan perikanan.

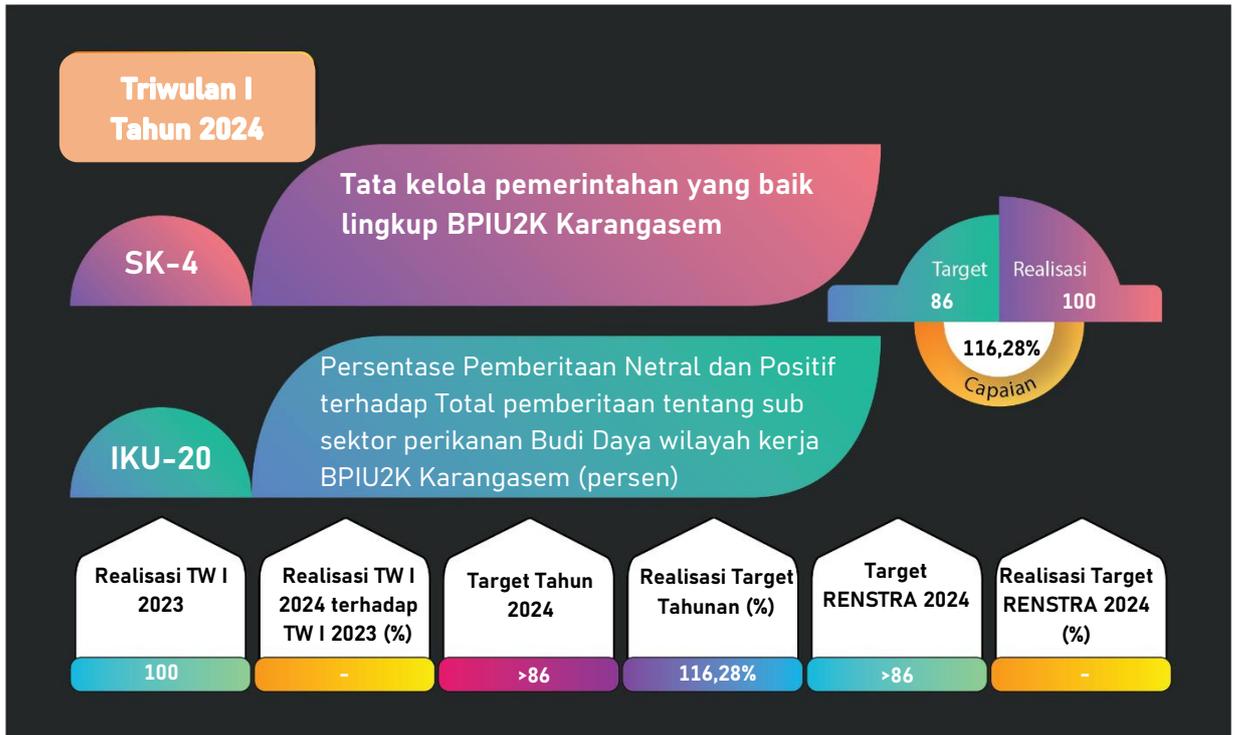


Gambar 3. 31 Pelaku Usaha Budi Daya Ikan Yang Terintegrasi KUSUKA

Sampai dengan Triwulan I belum terdapat penetapan target atas indikator ini dikarenakan pengukuran dilakukan secara tahunan. Rekomendasi rencana aksi pada periode yang akan datang adalah tetap melakukan pendaftaran pelaku usaha budi daya ikan lingkup BPIU2K Karangasem di aplikasi KUSUKA KKP.

IKU 20. Persentase Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total pemberitaan tentang sub sektor perikanan Budi Daya wilayah kerja BPIU2K Karangasem (persen)

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung indikator kinerja ini adalah BPIU2K Karangasem secara rutin menyampaikan keberhasilan kinerja pada media sosial milik satker dan atau pun pada media massa lainnya. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan perhitungan perbandingan jumlah pemberitaan negatif terhadap jumlah publikasi yang dilakukan oleh BPIU2K Karangasem.



Gambar 3. 32 Rasio jumlah pemberitaan netral dan positif

Pada Triwulan I target yang ditetapkan sebesar 86% dengan capaian 100%. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya dikarenakan indikator ini merupakan indikator yang baru. Keberhasilan atas pencapaian target ini dipengaruhi oleh publikasi kegiatan BPIU2K Karangasem yang memberikan dampak positif di masyarakat. Pada indikator ini tidak terdapat anggaran yang dikhususkan untuk merealisasikan target yang ditetapkan.

Rekomendasi rencana aksi pada periode triwulan berikutnya yaitu tetap melakukan perhitungan berita negatif, netral, dan positif terhadap pemberitaan tentang budidaya lingkup Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem.

BULAN : JANUARI - MARET (TRIWULAN I)
 TA. : 2024
 KEMENTERIAN : KELAUTAN DAN PERIKANAN
 SATKER/UPT : BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM

No.	Jenis Media	Target TA 2024 (%)	Target Tw. I (%)	JANUARI			FEBRUARI			MARET			S.D TRIWULAN I			CAPAIAN (%)	PERSENTASE CAPAIAN TRIWULAN I (%)
				Jumlah Pemberitaan	Positif dan Netral	Negatif	Jumlah Pemberitaan	Positif dan Netral	Negatif	Jumlah Pemberitaan	Positif dan Netral	Negatif	Jumlah Pemberitaan	Positif dan Netral	Negatif		
1.	Media Eksternal	85%	85%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Media Sosial BPIU2K Karangasem			04	04	-	30	30	-	52	52	-	100	100	-	100%	
3.	Total			04	04	-	30	30	-	52	52	-	100	100	-	100%	

Mengetahui
 Kepala BPIU2K Karangasem
 Wawan Prabowo, S.Pi, M.Sc
 NIP. 19811209 200604 1 001

Karangasem, 1 April 2024
 Kasubag Umum,
 I Gusti Putu Agung, S.Pi
 NIP. 19730623 199903 1 004

Persentase pemberitaan netral dan positif lingkup BPIU2K Karangasem

Gambar 3. 33 Capaian Indikator Kinerja sesuai data dukung

IKU 21. Nilai pengawasan kearsipan BPIU2K Karangasem (Nilai)

Indikator ini merupakan kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Pada indikator ini tidak terdapat anggaran yang dikhususkan untuk pencapaian target.



Gambar 3. 34 Nilai pengawasan kearsipan

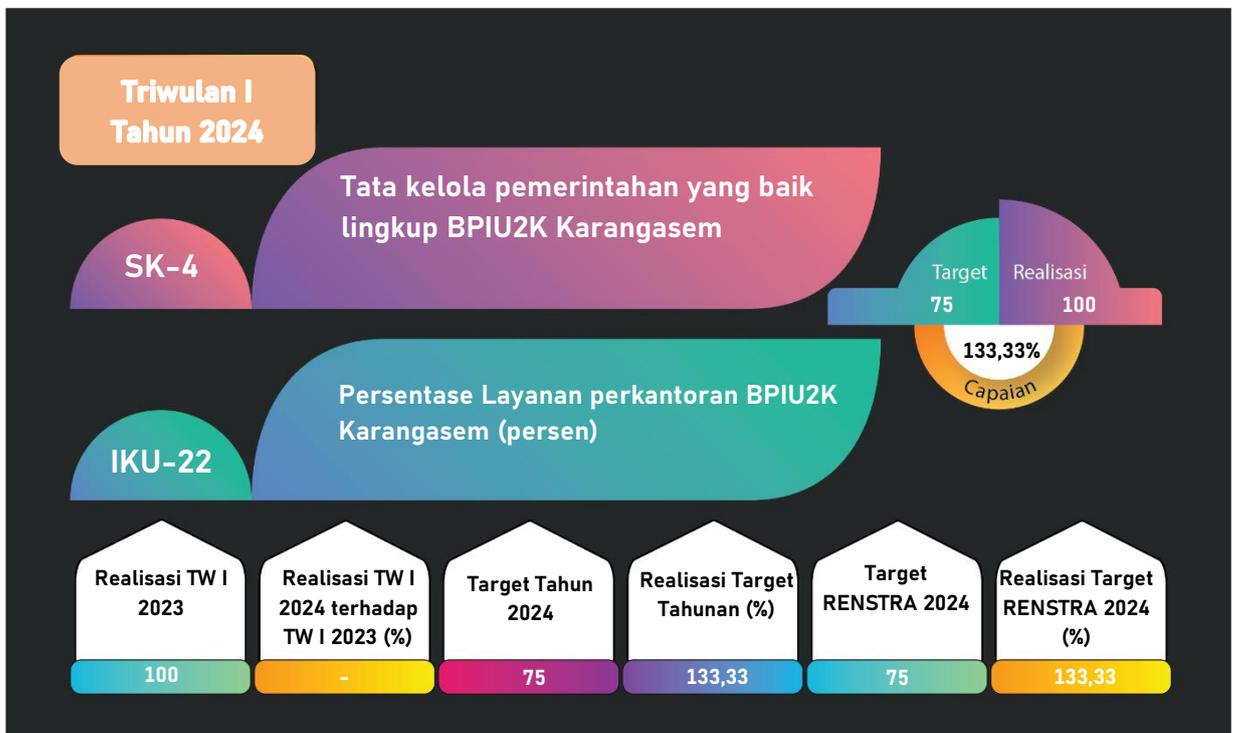
Sampai dengan Triwulan I belum terdapat penetapan target atas indikator ini dikarenakan penilaian akan dilakukan secara tahunan. Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung indikator ini yaitu melakukan kegiatan pengelolaan

arsip dinamis berupa kegiatan surat menyurat yang dilakukan menggunakan aplikasi e-layar, mengajukan permohonan untuk pemusnahan arsip Tahun 2021 ke belakang.

Rekomendasi rencana aksi pada periode yang akan datang adalah tetap melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan selanjutnya dilakukan permohonan untuk pemusnahan arsip.

IKU 22. Persentase Layanan Perkantoran BPIU2K Karangasem

Indikator layanan perkantoran merupakan pengukuran kualitas kegiatan layanan yang lebih bersifat pada pelayanan internal layanan jamuan rapat, layanan daya dan jasa, perawatan kendaraan dan layanan lainnya. Pada indikator ini tidak terdapat anggaran yang dikhususkan untuk pencapaian target.



Gambar 3. 35 Layanan perkantoran

Sampai dengan Triwulan I telah dilakukan pengukuran layanan perkantoran lingkup BPIU2K Karangasem dengan realisasi nilai 100, dan persentase capaian 133,33%. Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung indikator ini adalah melakukan pemenuhan atas permintaan layanan perkantoran meliputi permintaan layanan tamu, layanan rapat, ATK dan perkantoran, dan perawatan kendaraan.

Pada indikator ini tidak terdapat anggaran khusus yang digunakan untuk merealisasikan target yang telah ditetapkan karena kegiatan yang dilakukan merupakan pelayanan internal yang dipengaruhi oleh kondisi dan keadaan di lapangan dan tergantung permintaan. Rekomendasi rencana aksi pada masa yang akan datang adalah tetap melakukan pemenuhan atas permintaan layanan perkantoran.

**DATA CAPAIAN LAYANAN PERKANTORAN
LINGKUP BPIU2K KARANGASEM
TAHUN 2024**

No.	Bulan	Jenis Layanan								Target TW	Capaian	Persentase
		Pelayanan Kedatangan Tamu (Kunjungan)		Pelayanan Pertemuan (Rapat)		Pelayanan ATK dan RT Kantor (Kebutuhan)		Perawatan Kendaraan (Tagihan Pemeliharaan/Service)				
		Permintaan	Terselesaikan	Permintaan	Terselesaikan	Permintaan	Terselesaikan	Permintaan	Terselesaikan			
1	JANUARI	0	0	0	0	6	6	4	4		100%	
2	FEBRUARI	0	0	1	1	2	2	3	3		100%	
3	MARET	4	4	2	2	4	4	1	1		100%	
TRIWULAN I										80%	100%	125%

Layanan perkantoran lingkup BPIU2K Karangasem

Gambar 3. 36 Capaian Indikator Kinerja sesuai data dukung

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Alokasi anggaran APBN TA 2024 pada Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekeurangan Karangasem berdasarkan DIPA-032.04.2.445394/2024 Tanggal 28 November 2023 pada awal penetapan RKAKL sebesar Rp18.447.530.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.516.891.667 dengan persentase sebesar 24,49% berdasarkan aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OM-SPAN)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

Bulan : 01 s.d. 03

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja										Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer		
1	445394 BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	PAGU	4,024,710,000	13,261,003,000	1,161,817,000	0	0	0	0	0	0	0	18,447,530,000
		REALISASI	886,955,995 (22.04%)	3,312,435,672 (24.98%)	317,500,000 (27.33%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4,516,891,667 (24.49%)
		SISA	3,137,754,005	9,948,567,328	844,317,000	0	0	0	0	0	0	13,930,638,333	
GRAND TOTAL		PAGU	4,024,710,000	13,261,003,000	1,161,817,000	0	0	0	0	0	0	18,447,530,000	
		REALISASI	886,955,995 (22.04%)	3,312,435,672 (24.98%)	317,500,000 (27.33%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	4,516,891,667 (24.49%)	
		SISA	3,137,754,005	9,948,567,328	844,317,000	0	0	0	0	0	0	13,930,638,333	

Gambar 3. 37 Pagu dan Realisasi Belanja s.d triwulan I 2024

Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi anggaran berdasarkan jenis kegiatan

Kegiatan	Persentase Realisasi sd Triwulan I (%)	
	2023	2024
Alokasi Anggaran	19.337.031.000	18.447.530.000
Realisasi Anggaran		
Pengelolaan Perbenihan Ikan	1,590,398,312	2,214,524,591
Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	466,101,300	83,756,651
Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	83,977,640	287,441,798
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	1,828,819,395	1,931,168,627
Realisasi Anggaran	3,969,296,647	4,516,891,667
Persentase Realisasi Keseluruhan	20,53%	24,49%

Secara keseluruhan realisasi anggaran Triwulan I tahun 2024 telah menunjukkan hasil yang maksimal. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, persentase realisasi anggaran Triwulan I tahun ini mengalami peningkatan. Rekomendasi rencana aksi pada periode triwulan berikutnya adalah melakukan realisasi anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang telah disusun.

3.4 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA

a) Sumberdaya Anggaran

Kementerian atau Lembaga yang mengalokasikan dana untuk membiayai program dan kegiatannya harus melihat beberapa hal terkait, yaitu: 1) apa hasil dan manfaat yang bisa diperoleh masyarakat pengguna layanan (*output and outcome oriented*); 2) tugas fungsi Unit Kerja yang melekat pada struktur organisasi (*money follow function*); dan 3) fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (*let the manager manages*). Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara *input* (masukan) dan *output* (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Pengukuran efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran dapat dilakukan dengan melihat data target dan capaian realisasi, data pagu anggaran, dan data realisasi anggaran.

Tabel 3. 5 Efisiensi anggaran Triwulan I tahun 2024

SASARAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP/JUTA)	REALISASI (RP)	NKO (%)	REALISASI ANGGARAN (%)	EFISIENSI ANGGARAN (%)
Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya meningkat di BPIU2K Karangasem					
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan					
Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan perikanan budidaya bidang kawasan dan kesehatan ikan	18.447.530.000	4.516.891.667	117,05	24,49	-
Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di BPIU2K Karangasem					

Berdasarkan tabel di atas, tingkat efisiensi penggunaan anggaran Triwulan I TA 2024 untuk merealisasikan capaian output kegiatan belum dapat dihitung karena pengukuran akan dilakukan pada akhir tahun. Rekomendasi rencana aksi pada periode yang akan datang adalah pelaksanaan kegiatan lebih berorientasi kepada capaian output dan sasaran kegiatan.

b) Sumberdaya Manusia

Secara keseluruhan jumlah pegawai BPIU2K Karangasem sampai dengan 31 Maret 2024 sebanyak 27 PNS (Pegawai Negeri Sipil), 7 (tujuh) PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), 26 tenaga PPNP (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri), dan 35 (tiga puluh lima) (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan) dengan total 95 orang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sampai dengan merealisasikan target kinerja yang ditetapkan pada TA 2024. Namun jika melihat hasil analisis beban kerja BPIU2K Karangasem tahun 2024 sebesar 8.566.775 menit/tahun yang semestinya dipikul oleh SDM/pegawai sebanyak 114 orang, maka masih terdapat kekurangan sebanyak 19 orang. Berkaitan dengan hal tersebut, besar harapan ke depannya BPIU2K Karangasem

mendapatkan tambahan SDM/pegawai untuk lebih mengefisiensikan pembagian tugas dan tanggungjawab sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

- a) Terdapat perbedaan target pada Perjanjian Kinerja 2024 dan Renstra 2020-2024 yang disebabkan oleh adanya penyesuaian nomenklatur dan target volume mengacu pada Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dalam SK DJPB
- b) Hasil Kinerja atau Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) pada aplikasi Kinerjaku sebesar 117,05%. Secara keseluruhan target yang ditetapkan telah tercapai
- c) Laporan kinerja Triwulan I tahun 2024 ini disusun secara transparan dan akuntabel sebagai upaya untuk memberikan gambaran atas hasil dan evaluasi capaian indikator kinerja utama BPIU2K Karangasem yang telah ditetapkan.

4.2 SARAN

Dalam rangka peningkatan kinerja pada masa yang akan datang, perlu adanya peningkatan koordinasi dan komunikasi dalam pengendalian rutin (bulanan, triwulanan) yang melibatkan pimpinan serta penanggungjawab indikator kinerja yang ditetapkan untuk percepatan pelaksanaan kegiatan yang menopang kegiatan rutin lainnya terutama pengadaan sarana dan prasarana.